

KONDISI HAK

ASASI MANUSIA

DI DUNIA

APRIL 2024

AMNESTY
INTERNATIONAL



AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Visi kami adalah tempat para penguasa menepati janjinya, menghormati hukum internasional, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami percaya bertindak dalam solidaritas dan dengan hati bersama semua orang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

Amnesty International adalah gerakan imparsial. Kami tidak mengambil posisi apapun tentang isu kedaulatan, sengketa teritorial atau pengaturan politik atau hukum internasional yang mungkin diadopsi untuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri. Oleh karena kepentingan kami untuk menyoroiti akuntabilitas negara, kami mencatat informasi mengenai situasi hak asasi manusia di dunia secara khusus, sesuai dengan pembagian negara yang bertanggung jawab atas situasi hak asasi manusia di teritori mereka.

Pertama kali diterbitkan tahun 2024 oleh Amnesty International Ltd Peter Benenson House, 1, Easton Street, London WC1X 0DW United Kingdom © Amnesty International 2024 Index: POL 10/7200/2024 ISBN:978-0-86210-509-9 Bahasa asli: Bahasa Inggris

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org.

Laporan ini mendokumentasikan kerja dan kekhawatiran Amnesty International sepanjang tahun 2023 sekaligus analisis global mengenai tantangan terhadap hak asasi manusia yang sedang berlangsung. Laporan ini meliputi situasi hak asasi manusia yang dimonitor Amnesty Internasional selama 2023 di berbagai negara dan teritori.

Ketiadaan gambaran situasi sebuah negara atau teritori dalam laporan ini tidak menyiratkan nihilnya pelanggaran hak asasi manusia yang juga menjadi kekhawatiran Amnesty International. Begitu pula panjang tidaknya gambaran situasi sebuah negara di laporan ini sebagai dasar perbandingan kedalaman fokus Amnesty International di sebuah negara. Laporan ini tidak membahas secara panjang mengenai penggunaan vonis hukuman mati di mana Amnesty Internasional mencakup dokumentasinya dalam laporan mengenai penggunaan hukuman mati dan eksekusi mati global.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKTIK-PRAKTIK “OTORITER” YANG BERMUNCULAN	iii
KEMBALI KE SEBELUM TAHUN 1948?	iv
MASA DEPAN YANG KITA TIDAK INGINKAN	v
SOLIDARITAS GLOBAL	v
ANALISIS GLOBAL	7
PERLAKUAN TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA	7
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS	9
REAKSI TERHADAP KEADILAN GENDER	11
PENGARUH KRISIS EKONOMI DAN PERUBAHAN IKLIM	13
ANCAMAN TEKNOLOGI BARU DAN YANG SUDAH ADA	16
RINGKASAN KAWASAN ASIA – PASIFIK	18
KEBEBASAN BEREKSPRESI	18
KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT SECARA DAMAI	19
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG	20
IMPUNITAS DAN HAK ATAS KEADILAN	21
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	21
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	21
AKUNTABILITAS PERUSAHAAN	22
KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	22
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN	23
HAK-HAK KELOMPOK RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS	23
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN DISKRIMINASI BERBASIS ETNIS DAN KASTA	24
PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA	24
HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT	24
HAK-HAK PENGUNSI DAN MIGRAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA	25
HUKUMAN MATI	26
HAK-HAK ANAK	26
INDONESIA	28
LATAR BELAKANG	28
KEBEBASAN BERKUMPUL	28
KEBEBASAN BEREKSPRESI	29
PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM	29
PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA	29
PELANGGARAN OLEH KELOMPOK BERSENJATA	30
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	30
HAK ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT	30

KATA PENGANTAR

Saya tidak pernah mengharapkan kondisi hak asasi manusia akan membawa saya untuk merujuk pada film fiksi ilmiah tahun 1980-an, *Back to the Future*. Namun, di sinilah kita berada. Sebuah dunia yang melintasi waktu, meluncur mundur melewati janji universal hak asasi manusia tahun 1948, bahkan saat berputar semakin cepat menuju masa depan yang dikuasai oleh raksasa teknologi dan kecerdasan artifisial (AI) generatif yang tidak diatur.

PRAKTIK-PRAKTIK “OTORITER” YANG BERMUNCULAN

Pada tahun 2023, V-Dem, pusat penelitian ilmu politik, menemukan bahwa jumlah orang yang tinggal di dalam negara-negara demokrasi (secara luas didefinisikan sebagai negara-negara yang memberikan aturan hukum, pembatasan terhadap eksekutif oleh legislatif dan yudikatif, serta menghormati kebebasan sipil) telah mengalami kemunduran sama seperti setingkat tahun 1985: sebelum runtuhnya tembok Berlin, sebelum Nelson Mandela dibebaskan dari penjara, sebelum Perang Dingin berakhir dengan harapan bahwa era baru bagi umat manusia akan segera terwujud.

Era baru tersebut hanya berlangsung sesaat dan hari ini hampir lenyap. Bukti tentang berlalunya era tersebut semakin nyata pada tahun 2023. Praktik dan gagasan "otoriter" meresap di banyak pemerintahan dan masyarakat. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, kebijakan otoriter merongrong kebebasan berekspresi dan asosiasi, menyerang kesetaraan gender, dan mengikis hak-hak seksual dan reproduksi.

Dasar narasi publik, berbasis pada kebencian dan berakar dalam ketakutan, merambah ruang sipil dan menjelekkkan individu dan kelompok yang terpinggirkan, dengan para pengungsi, imigran, dan kelompok berkebangsaan tertentu menanggung beban yang paling berat.

Perlawanan terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender semakin gencar pada tahun 2023, dengan ancaman terhadap banyak kemajuan selama 20 tahun terakhir.

Di Afghanistan, menjadi seorang perempuan atau gadis telah secara de facto dinyatakan sebagai kejahatan. Pada tahun 2023, Taliban mengeluarkan puluhan dekret resmi yang bertujuan untuk menghapuskan perempuan dari kehidupan publik. Begitu juga di Iran, pihak berwenang terus melakukan penindasan brutal terhadap protes "Perempuan, Hidup, Kebebasan" dan mengeluarkan pernyataan resmi penuh kebencian yang menyebutkan bahwa melepaskan hijab perempuan adalah "virus", "penyakit sosial", dan "gangguan".

Di Amerika Serikat, 15 negara bagian menerapkan larangan total terhadap aborsi, atau larangan dengan pengecualian yang sangat terbatas, yang memberikan dampak yang tidak proporsional pada orang-orang kulit hitam dan kelompok berkebangsaan lainnya. Di Polandia, setidaknya satu perempuan meninggal karena hukum di negara tersebut menolak pelayanan aborsi yang dia butuhkan. Uganda mengadopsi undang-undang anti-gay yang keras, sementara pemimpin sosial dan politik di AS juga mempromosikan narasi, kebijakan, dan regulasi anti-trans.

Meskipun dunia belum pernah lebih kaya, tahun 2023, seperti yang disebutkan oleh Bank Dunia, adalah "tahun ketidaksetaraan". Di berbagai tempat seperti Inggris, Hungaria, dan India, para pembela hak ekonomi dan sosial adalah salah satu kelompok aktivis yang paling banyak menjadi sasaran. Aktivis iklim ditandai sebagai "teroris" karena menentang pemerintah yang memperluas produksi dan investasi bahan bakar fosil. Kritikus terhadap penanganan pemerintah terhadap ekonomi di Timur Tengah, serikat pekerja di Asia-Pasifik yang disensor dan ditahan secara sewenang-wenang, begitu juga mereka yang memerangi korupsi di Afrika Barat.

KEMBALI KE SEBELUM TAHUN 1948?

Namun, pada tahun 2023, mesin waktu metaforis kita juga melemparkan kita lebih jauh dari tahun 1985 ke belakang: turun ke dalam neraka yang gerbangnya telah ditutup rapat pada tahun 1948. “Tidak akan pernah lagi”, dunia telah menyatakan setelah terjadinya perang global dengan beberapa dampaknya. 55 juta kematian warga sipil, ketika dihadapkan pada kengerian Holocaust yang menyebabkan pemusnahan enam juta orang Yahudi dan jutaan lainnya.

Namun pada tahun 2023, pelajaran moral dan hukum yang “tidak akan pernah lagi” terkoyak hingga jutaan keping. Menyusul kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 – ketika lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil Israel, terbunuh, ribuan lainnya terluka, dan sekitar 245 orang disandera – Israel memulai operasi militer balasan yang menjadi hukuman kolektif. Ini adalah sebuah kampanye pemboman yang disengaja dan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, penolakan bantuan kemanusiaan, dan bencana kelaparan yang direayasa.

Pada akhir tahun 2023, 21.600 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, telah terbunuh dalam pemboman tanpa henti di Gaza, dengan ribuan lainnya hilang, diyakini terkubur di bawah reruntuhan. Sebagian besar infrastruktur sipil di Gaza telah hancur, sementara hampir 1,9 juta warga Palestina terpaksa mengungsi dan kehilangan akses terhadap makanan, air, tempat tinggal, sanitasi, dan bantuan medis yang memadai.

Menjadi warga Palestina di Gaza saat ini berarti terjerumus ke dalam versi “Nakba” atau “malapetaka” tahun 1948 yang jauh lebih kejam dan destruktif, ketika lebih dari 750.000 warga Palestina terpaksa mengungsi.

Bagi jutaan orang di seluruh dunia, Gaza kini melambangkan kegagalan moral yang dilakukan banyak arsitek sistem pasca-Perang Dunia Kedua; kegagalan mereka dalam menegakkan komitmen mutlak terhadap universalitas, kemanusiaan kita bersama, dan komitmen “tidak akan pernah lagi”. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, Konvensi Jenewa, Konvensi Genosida, dan hukum hak asasi manusia internasional telah diabaikan. Hal ini paling jelas terlihat pada kasus yang dilakukan oleh pihak berwenang Israel. Namun, Israel tidak sendirian. Amerika Serikat juga telah memainkan peran utama, begitu pula beberapa pemimpin Eropa dan pucuk pimpinan Uni Eropa. Demikian pula halnya dengan mereka yang terus mengirim senjata ke Israel, mereka yang tidak mengecam pelanggaran yang dilakukan Israel tanpa henti, dan mereka yang menolak seruan gencatan senjata.

Perilaku mereka menunjukkan standar ganda yang dikecam Amnesty International selama bertahun-tahun. Namun, aktor-aktor berpengaruh kini telah melangkah lebih jauh, menunjukkan kesediaan mereka untuk membahayakan seluruh tatanan berbasis aturan yang berlaku pada tahun 1948, dengan melucuti prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan universalitas, sehingga menanggalkan kapasitas global kita untuk mencegah hal-hal terburuk.

Hal ini terjadi setelah invasi besar-besaran Rusia terhadap Ukraina, yang merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan perongrongan terhadap supremasi hukum internasional. Agresi Rusia terus terwujud dalam serangan yang disengaja terhadap warga sipil, pembunuhan ribuan orang, dan penghancuran infrastruktur sipil secara luas, termasuk fasilitas penyimpanan dan ekspor gandum Ukraina.

Tiongkok juga, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah bertindak melawan hukum internasional, dengan melindungi militer Myanmar dan serangan udaranya yang melanggar hukum, melalui praktik penangkapan dan penyiksaan, dan dengan melindungi diri dari pengawasan internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan, termasuk terhadap minoritas Uighur.

MASA DEPAN YANG KITA TIDAK INGIN

Pada tahun 2023, dengan peluncuran ChatGPT-4 dan alat kecerdasan buatan generatif lainnya yang jauh lebih awal dari yang diharapkan, kita juga melesat lebih cepat ke masa depan. Jika penyalahgunaan terkait teknologi yang disaksikan pada tahun 2023 menjadi pertanda apa pun, prospek masa depan kita memang sangat mengkhawatirkan.

Teknologi memungkinkan pengikisan hak yang meluas: memperpanjang kebijakan yang rasis, memungkinkan penyebaran misinformasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Perusahaan teknologi raksasa mengabaikan atau meminimalkan kerusakan tersebut, bahkan dalam konteks konflik bersenjata seperti di Etiopia, Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina, Myanmar, dan Sudan. Dengan meningkatnya pesat hasutan online dan konten berbahaya lainnya terhadap komunitas Palestina dan Yahudi, Eropa dan AS juga terdapat peningkatan yang mencolok dalam kejahatan kebencian anti-Muslim dan anti-Semit.

Pada tahun 2023, Negara-negara semakin mengandalkan teknologi pengenalan wajah untuk mendukung pengawasan kegiatan protes, acara olahraga, dan komunitas-komunitas terpinggirkan secara luas – terutama komunitas para migran dan pengungsi. Teknologi yang melanggar hak asasi manusia menjadi andalan dalam tata kelola migrasi dan pengamanan batas-batas negara, termasuk melalui teknologi eksternalisasi perbatasan, analisis data perangkat lunak, biometrik, dan sistem pengambilan keputusan berbasis algoritma.

Meskipun sudah ada bukti selama bertahun-tahun tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dimungkinkan oleh teknologi mata-mata, perangkat lunak mata-mata tetap tidak diatur. Pada tahun 2023, Amnesty International mengungkapkan penggunaan perangkat lunak mata-mata Pegasus terhadap jurnalis dan aktivis masyarakat sipil di Armenia, Republik Dominika, India, dan Serbia, sementara perangkat lunak mata-mata berbasis Uni Eropa dijual kepada negara-negara di seluruh dunia. Sebagai tanggapan, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi pada November 2023, yang mengkritik kurangnya tindakan untuk mengendalikan penyalahgunaan oleh industri perangkat lunak mata-mata.

Namun, dengan para pelanggar teknologi dan teknologi liar mereka dibiarkan berkeliaran secara bebas di Wild West digital, pelanggaran hak asasi manusia kemungkinan akan meningkat pada tahun 2024, tahun penting pemilihan umum. Ini adalah sebuah peringatan akan masa depan yang sudah di depan mata kita.

SOLIDARITAS GLOBAL

Kemunduran hak asasi manusia pada tahun 2023 bukannya tidak terjadi begitu saja. Sebaliknya. Masyarakat di seluruh dunia telah menentang kemunduran ini, dan menunjukkan solidaritas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Konflik Israel-Hamas memicu ratusan demonstrasi di seluruh dunia, jutaan orang memprotes kematian warga sipil, menyerukan pembebasan sandera, dan menuntut gencatan senjata.

Sekretaris Jenderal PBB, para pemimpin badan-badan PBB, dan organisasi-organisasi kemanusiaan mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengecam kejahatan perang yang dilakukan di Israel bagian selatan dan Gaza dan menyerukan Israel untuk menghormati hukum internasional.

Resolusi Majelis Umum PBB pada akhir tahun 2023 yang menyerukan gencatan senjata diadopsi dengan mayoritas besar sementara Afrika Selatan mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional, menuduh bahwa tindakan Israel di Gaza melanggar Konvensi Genosida 1948 dan menekankan pentingnya konflik pasca-perang dunia berbasis aturan internasional Perang Dunia Kedua.

Pada tahun 2023, momentum untuk membangun rezim global untuk perpajakan yang lebih adil, untuk membantu mencegah penggelapan dan penghindaran pajak serta menggerakkan sumber daya bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Pada bulan November, bertentangan dengan keinginan negara-negara berpenghasilan tinggi, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Grup Afrika yang menetapkan sebuah komite internasional untuk menyusun konvensi pajak PBB pada Juni 2025.

Pada tahun 2023, banyak orang yang menentang dan mengganggu kekuatan yang mendorong dunia mundur ke kondisi tahun 1985 dan pra-1948; orang-orang yang berdemonstrasi dan memprotes kekuatan yang akan mendorong kita semua ke masa depan yang bukan hasil perancangan kita. Mereka juga telah membentuk tahun 2023, melawan segala rintangan.

Saya berharap bahwa pada tahun 2048 – atau bahkan 3048 – ketika diplomat dan aktivis melihat kembali tahun yang telah berlalu, mereka akan menemukan bahwa ada banyak sekali orang baik di seluruh dunia yang telah melakukan segala sesuatu yang mereka bisa. Yang berdiri teguh dan bersuara. Demi kemanusiaan kita bersama

Agnès Callamard

Sekretaris Jenderal Amnesty International

ANALISIS GLOBAL

Pola pelanggaran hak asasi manusia tersebar luas pada tahun 2023. Negara dan kelompok bersenjata sering kali melakukan serangan dan pembunuhan di luar hukum seiring dengan semakin meningkatnya konflik bersenjata. Pihak berwenang di seluruh dunia menindas perbedaan pendapat dengan menerapkan tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai, menggunakan kekuatan yang melanggar hukum terhadap pengunjung rasa, secara sewenang-wenang menangkap dan menahan pembela hak asasi manusia, lawan politik dan aktivis lainnya, dan terkadang menyiksa dan memperlakukan mereka dengan buruk. Banyak negara gagal mengambil tindakan untuk memenuhi hak masyarakat atas pangan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang sehat, serta mengabaikan ketidakadilan ekonomi dan krisis iklim. Pemerintah sering kali memperlakukan para pengungsi dan migran dengan cara yang kasar dan rasis. Diskriminasi yang mengakar terhadap perempuan, kelompok ragam gender dan seksualitas, masyarakat adat dan kelompok berbasis ras atau agama meminggirkan kelompok ini dan menempatkan mereka pada risiko kekerasan dan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial yang tidak proporsional. Perusahaan multinasional berperan dalam beberapa pelanggaran ini. Uraian ini menjelaskan tren-tren di tingkat kawasan.

Analisis global ini berfokus pada empat isu yang menyoroti beberapa tren buruk di tingkat global: perlakuan terhadap warga sipil sebagai hal yang dapat dikorbankan dalam konflik bersenjata; meningkatnya penolakan terhadap keadilan berbasis gender; dampak yang tidak merata dari krisis ekonomi, perubahan iklim dan degradasi lingkungan terhadap kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan; dan ancaman teknologi baru dan yang sudah ada, termasuk kecerdasan buatan generatif (AI). Dari sudut pandang Amnesty International, hal-hal tersebut mewakili tantangan-tantangan penting bagi hak asasi manusia di seluruh dunia pada tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang. Negara-negara harus mengambil tindakan bersama untuk mengatasinya dan mencegah timbulnya atau memperparah konflik dan krisis lebih lanjut.

PERLAKUAN TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA

Negara-negara dan kelompok-kelompok bersenjata memperlakukan warga sipil sebagai pihak yang dapat dikorbankan dalam konflik bersenjata, yang sebagian di antaranya berakar pada diskriminasi ras dan etnis. Sistem internasional yang ada saat ini secara umum tidak mampu mengambil tindakan segera dan efektif untuk melindungi mereka, karena terkadang dilumpuhkan oleh standar ganda yang rasis dan persaingan antar negara-negara adidaya.

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Pelanggaran hukum humaniter internasional, yang juga dikenal sebagai hukum perang, telah menimbulkan dampak yang buruk bagi warga sipil. Dalam banyak konflik, pasukan pemerintah mengandalkan serangan darat dan udara jarak jauh dengan menggunakan senjata yang berdampak luas terhadap wilayah berpenduduk. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap jatuhnya banyak korban masyarakat sipil dan kerusakan yang luas pada rumah-rumah dan infrastruktur.

Beberapa pihak yang berkonflik bertindak seolah-olah menghormati aturan hukum humaniter internasional adalah sebuah pilihan. Agresi Rusia terhadap Ukraina ditandai dengan kejahatan perang yang terus-menerus; Pasukan Rusia tanpa pandang bulu telah menyerang wilayah

berpenduduk dan infrastruktur energi serta ekspor biji-bijian, menyiksa atau memperlakukan tawanan perang dengan buruk, dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang luas melalui tindakan-tindakan termasuk penghancuran bendungan Kakhovka yang tampaknya disengaja. Militer Myanmar dan kelompok milisi terkait telah melakukan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil, serta serangan tanpa pandang bulu, yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.000 warga sipil pada tahun 2023. Namun pemerintah Rusia dan Myanmar jarang menanggapi laporan pelanggaran yang mencolok, apalagi berkomitmen untuk menyelidikinya. Keduanya telah menerima dukungan finansial dan militer dari Tiongkok.

Di Sudan, kedua pihak yang bertikai, Angkatan Bersenjata Sudan dan *Rapid Support Force*, tidak menunjukkan kepedulian terhadap hukum humaniter internasional ketika mereka melakukan serangan yang telah membunuh dan melukai warga sipil dan meluncurkan senjata peledak dari lingkungan padat penduduk. Antara pecahnya pertempuran pada bulan April 2023 dan akhir tahun ini, lebih dari 12.000 orang telah terbunuh, lebih dari 5,8 juta lainnya menjadi pengungsi internal dan sekitar 1,4 juta orang meninggalkan negara tersebut sebagai pengungsi.

Pihak berwenang Israel telah melakukan upaya khusus untuk menggambarkan serangan yang mereka lakukan di Gaza sebagai tindakan yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Pada kenyataannya, mereka telah mengejek beberapa norma dasar dari hukum tersebut. Mereka telah mengabaikan prinsip-prinsip pembedaan dan proporsionalitas dengan banyaknya korban sipil dan penghancuran besar-besaran terhadap objek-objek sipil. Pada akhir tahun 2023, pemboman dan serangan darat tanpa henti yang mereka lakukan telah menewaskan, menurut kementerian kesehatan Gaza, 21.600 warga Palestina, sepertiga di antaranya adalah anak-anak. Bukti kejahatan perang meningkat ketika pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsi dan bangunan tempat tinggal yang padat penduduk, berulang kali membunuh sebuah keluarga dan menghancurkan rumah sakit, sekolah yang dikelola PBB, toko roti dan infrastruktur penting lainnya. Mereka menggambarkan perintah evakuasi di Gaza utara sebagai peringatan dan tindakan pencegahan yang efektif, namun dalam praktiknya, mereka memaksa hampir 1,9 juta warga Palestina (83% dari total populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa) untuk mengungsi dari rumah mereka dan dengan sengaja menolak bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari blokade ilegal yang sedang berlangsung di Gaza. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya, termasuk meningkatnya retorika rasis dan tidak manusiawi terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah Israel, merupakan tanda-tanda peringatan terjadinya genosida.

Sementara itu, Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya membenarkan serangan yang mereka lakukan pada 7 Oktober 2023, sebelum pemboman dan serangan darat Israel, sebagai perlawanan terhadap pendudukan militer Israel yang telah lama berlangsung di Gaza dan Tepi Barat. Namun, pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil di Israel, penyanderaan 245 orang dan penembakan roket tanpa pandang bulu ke Israel, di antara kejahatan lainnya, melanggar hukum kemanusiaan internasional dan merupakan kejahatan perang.

Kendati tingkat pertumpahan darah, kehancuran dan penderitaan warga sipil sangat besar di Gaza, Amerika Serikat (AS) dan banyak negara Eropa secara terbuka mendukung pendekatan Israel. Beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, terus mempersenjatai Israel dengan senjata yang digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara terang-terangan. Mengingat protes mereka yang beralasan terhadap kejahatan perang yang dilakukan Rusia dan Hamas, negara-negara tersebut telah menunjukkan standar ganda, sehingga melemahkan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional dan perlindungan warga sipil. Hal ini membawa Israel ke Mahkamah Internasional mengenai pelanggaran atas Konvensi Genosida 1948 di Gaza.

Pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata juga mengabaikan hukum kemanusiaan internasional dalam konflik bersenjata di Afghanistan, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah (CAR), Republik Demokratik Kongo (DRC), Ethiopia, Libya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman pada tahun 2023. Warga sipil menanggung beban terberat

akibat serangan tanpa pandang bulu dan melanggar hukum lainnya, yang beberapa di antaranya merupakan kejahatan perang.

Kekerasan berbasis gender telah menjadi ciri utama dari beberapa konflik ini. Dalam konteks kekerasan seksual yang lebih luas yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Eritrea, pasukan ini menculik setidaknya 15 wanita dan menahan mereka selama hampir tiga bulan di sebuah kamp militer di wilayah Tigray, Ethiopia pada tahun 2023, dan memperkosa mereka berulang kali. Di Kongo, di provinsi Nord-Kivu saja terdapat lebih dari 38.000 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan selama kuartal pertama tahun 2023.

Pemerintah telah menekan suara-suara yang mengkritik tindakan militer dan dampaknya terhadap warga sipil. Rusia meningkatkan sensor masa perang ke tingkat yang lebih tinggi pada tahun 2023. Pembela hak asasi manusia, media dan aktivis politik yang bekerja di lingkungan konflik dan pasca-konflik telah diserang. Pembela hak asasi manusia perempuan menghadapi tantangan khusus.¹

DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Rasisme menjadi inti dari beberapa konflik bersenjata ini dan respons terhadap konflik tersebut.

Akar konflik yang terjadi di Israel dan pendudukan wilayah Palestina sebagian terletak pada bentuk diskriminasi rasial yang ekstrim – yaitu sistem apartheid yang diterapkan Israel terhadap warga Palestina – yang mana Israel menindas dan mendominasi warga Palestina melalui fragmentasi wilayah, segregasi dan kontrol, perampasan tanah dan properti, dan penolakan hak-hak ekonomi dan sosial. Perbedaan etnis merupakan ciri konflik bersenjata di negara-negara termasuk Ethiopia, Myanmar dan Sudan.

Diskriminasi rasial juga terwujud dalam respons terhadap konflik-konflik ini. Standar ganda yang diskriminatif tidak hanya terlihat dalam retorika dan kebijakan AS dan banyak negara Eropa terhadap konflik di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina, namun juga dampaknya. Banyak negara telah memberlakukan pembatasan yang melanggar hukum terhadap protes sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Pemerintah di Austria, Perancis, Jerman, Hongaria, Polandia dan Swiss telah terlebih dahulu melarang protes semacam itu pada tahun 2023, dengan alasan risiko yang tidak jelas berkaitan ketertiban umum atau keamanan nasional dan, dalam beberapa kasus, stereotip rasis. Media dan politisi di AS, Eropa Barat, dan negara lain sering menggunakan retorika yang merendahkan martabat warga Palestina, menyebarkan wacana rasis, dan menyamakan umat Islam dengan teroris.

Dalam konteks yang sama, kejahatan kebencian antisemit dan anti-Muslim meningkat di Eropa dan Amerika. Terdapat juga peningkatan yang mengkhawatirkan dalam hal hasutan dan konten berbahaya lainnya yang diposting secara daring terhadap komunitas Palestina dan Yahudi secara lebih luas. Konten yang diposting oleh warga Palestina dan pembela hak-hak Palestina dilaporkan telah mengalami moderasi konten yang berpotensi diskriminatif oleh berbagai platform media sosial.²

Sementara itu, penelitian mengenai Etiopia yang dirilis pada bulan Oktober 2023 menunjukkan bagaimana kegagalan Meta untuk mengekang hasutan di platform Facebook-nya menyebabkan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya terhadap orang Tigray.³

Rasisme juga tampak dalam perlakuan terhadap mereka yang melarikan diri dari konflik dan krisis lainnya. Kebijakan penangkalan migrasi dan eksternalisasi yang diadopsi atau dipertahankan oleh Uni Eropa (UE), negara-negara Eropa lainnya, dan Amerika Serikat telah memaksa orang yang melarikan diri dari konflik, serta krisis lainnya, untuk melakukan perjalanan berbahaya. Ini berbanding terbalik dengan perlakuan positif terhadap orang-orang Ukraina yang mencari keamanan. Dalam perkembangan positif, Denmark, Finlandia, dan Swedia telah mengambil langkah-langkah pada Mei 2023 untuk memberikan pengakuan status pengungsi kepada

perempuan dan gadis Afghanistan. Namun, secara umum, negara-negara Eropa gagal menyediakan jalur yang aman dan teratur yang cukup untuk melindungi orang Afghanistan dan orang lain yang melarikan diri dari konflik dan pelanggaran hak asasi manusia serius.

SISTEM INTERNASIONAL

Lembaga-lembaga multilateral sering kali tidak mampu atau tidak mau menekan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Meskipun terbatasnya sumber daya menjadi salah satu faktor penyebabnya, banyak aktor di lembaga-lembaga tersebut yang gagal menunjukkan keberanian atau secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip mereka. Parahnya, para anggotanya telah menunjukkan permainan yang sinis dan egois.

Dewan Keamanan PBB tidak mampu mengambil tindakan efektif terhadap konflik-konflik besar. Dapat ditebak bahwa AS menggunakan hak vetonya untuk berulang kali mencegah Dewan tersebut menyerukan gencatan senjata di Gaza.⁴ Namun, kelumpuhannya telah meluas ke isu-isu yang dulunya merupakan landasan bersama. Pada bulan Juli 2023, mereka gagal memberi otorisasi ulang mekanisme lintas batas untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah. Kelompok Kerja untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata tidak dapat mencapai konsensus mengenai pelanggaran berat terhadap anak-anak di Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan Suriah, meskipun telah merundingkannya selama lebih dari satu tahun dan dalam beberapa kasus, selama dua tahun atau lebih.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mempunyai catatan yang tidak konsisten dalam menangani dampak konflik bersenjata. Pada tahun 2023, dewan tersebut membentuk mekanisme pemantauan hak asasi manusia di Sudan dan memperluas pelaporan hak asasi manusia di Rusia. Namun, mereka gagal memperluas mandat penting. Hal ini termasuk memperluas mandat Komisi Internasional Pakar Hak Asasi Manusia di Ethiopia, meskipun konflik di sana telah menyebabkan kematian hingga 600.000 warga sipil dan peringatan komisi tersebut tentang “risiko akut atas kekejaman lebih lanjut”. Mandat lain juga termasuk Misi Pencari Fakta di Libya, meskipun mereka menyimpulkan bahwa pelanggaran berat di negara tersebut terus berlanjut dengan impunitas. Beberapa negara secara aktif menentang perluasan mandat penting ini dan negara-negara yang sebelumnya mendukung pendirian mandat tersebut mengabaikan dukungan ini karena menghadapi perlawanan.

Setidaknya terdapat tanda-tanda bahwa PBB bersedia mengatasi ancaman mengerikan yang ditimbulkan oleh pengembangan sistem senjata otonom yang tidak diatur, yang mengancam akan menyerahkan pengambilan keputusan mengenai hidup dan mati seseorang pada algoritma yang digerakkan oleh AI. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang dengan dukungan umum pada bulan Desember 2023 yang menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah ini. Sekretaris Jenderal PBB dan Komite Palang Merah Internasional telah menyerukan negara-negara untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum tentang sistem senjata otonom pada tahun 2026.

Pertanggungjawaban atas kejahatan berdasarkan hukum internasional selama konflik bersenjata pada umumnya masih sulit dipahami dan Kantor Kejaksaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) semakin menunjukkan standar ganda dan selektivitas dalam menangani situasi yang berada dalam pengawasannya. Kantor Kejaksaan menutup penyelidikannya di Kenya dan Uganda dan gagal membuka penyelidikan yang diumumkan sebelumnya di Nigeria. Meskipun demikian, penyelidikan ICC terus berlanjut pada sejumlah situasi di mana Amnesty International mendokumentasikan kejahatan berdasarkan hukum internasional. Khususnya, surat perintah penangkapan ICC dikeluarkan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisar Hak Anak Maria Lvova-Belova atas dugaan kejahatan perang, dengan kewajiban bagi semua negara anggota ICC untuk menangkap dan menyerahkan mereka, sebagaimana dikonfirmasi oleh pengadilan

tinggi di Afrika Selatan. Jaksa ICC terlambat mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa penyelidikan ICC yang sedang berlangsung terhadap situasi di Palestina akan mencakup tindakan yang dilakukan di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina pada dan setelah tanggal 7 Oktober.

Selain itu, diadopsinya Konvensi Ljubljana-Den Haag tentang Kerja Sama Internasional dalam Investigasi dan Penuntutan Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Internasional lainnya (Konvensi Bantuan Hukum Timbal Balik) akan membuka peluang bagi para korban kejahatan berdasarkan hukum internasional untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan nasional.⁵

Semua negara anggota PBB harus mengambil langkah-langkah untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB sehingga anggota-anggota tetap pada Dewan tersebut tidak dapat menggunakan hak vetonya tanpa pengawasan. Mereka harus menandatangani dan meratifikasi tanpa syarat Konvensi Bantuan Hukum Timbal Balik. Mereka harus mengatasi akar penyebab konflik, termasuk diskriminasi ras dan etnis, dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, termasuk perlindungan warga sipil. Mereka harus memperkuat lembaga-lembaga PBB yang memainkan peran preventif, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sistem prosedur khusus, dan badan-badan yang menyelidiki, melaporkan, dan menyimpan bukti kejahatan berdasarkan hukum internasional.

REAKSI TERHADAP KEADILAN GENDER

Meskipun terdapat kemajuan di beberapa negara, perlawanan terhadap hak-hak perempuan, anak perempuan dan kelompok LGBTI semakin meningkat. Banyak negara yang mengabaikan hak-hak seksual dan reproduksi serta hak-hak LGBTI dan gagal mengatasi kekerasan berbasis gender.

DISKRIMINASI DAN HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI

Dalam beberapa tahun terakhir, pembela hak-hak perempuan dan organisasi masyarakat sipil semakin menghormati hak-hak perempuan serta hak-hak seksual dan reproduksi. Namun, kemajuan tersebut diremehkan. UN Women telah memperingatkan bahwa kesenjangan gender semakin memburuk.

Beberapa pemerintah telah memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Di Afghanistan, pihak berwenang telah melarang perempuan dan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan di luar sekolah dasar, bekerja di kantor PBB dan kantor-kantor organisasi masyarakat sipil internasional, dan bekerja di sebagian besar kantor publik. Di Iran, pihak berwenang telah meningkatkan tindakan keras mereka untuk menerapkan penggunaan kerudung. Para perempuan di kedua negara tersebut menghadapi pembalasan brutal dari negara karena menggunakan atau menuntut hak-hak mereka. Di Prancis pada tahun 2023, pihak berwenang meningkatkan pembatasan terhadap pakaian yang dianggap sebagai pakaian keagamaan di sekolah dan olahraga, sehingga mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan Muslim.

Kemajuan dicapai di beberapa negara mengenai hak-hak seksual dan reproduksi pada tahun 2023. Di Honduras, pemerintah mengakhiri 14 tahun larangan penggunaan dan penjualan pil kontrasepsi darurat, meskipun aborsi tetap dilarang. Di Meksiko, Mahkamah Agung menyatakan kriminalisasi aborsi tidak konstitusional. Di Finlandia dan Spanyol, akses terhadap aborsi difasilitasi.

Namun, di beberapa negara lain, pihak berwenang telah mengabaikan hak-hak seksual dan reproduksi, termasuk akses terhadap aborsi. Di AS, penerapan larangan total terhadap aborsi atau

larangan dengan pengecualian yang sangat terbatas di 15 negara bagian telah memberikan dampak yang tidak merata terhadap orang kulit hitam dan orang-orang dengan latar belakang rasial lainnya. Di Polandia setidaknya satu perempuan meninggal pada tahun 2023 akibat tidak diberikannya layanan aborsi. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok telah menyembunyikan informasi penting tentang hak-hak reproduksi menyusul keputusan Mahkamah Agung AS pada tahun 2022 yang mengakhiri perlindungan federal tentang hak atas aborsi. Mereka yang membela hak aborsi, termasuk para aktivis dan petugas layanan kesehatan, telah mengalami stigma, serangan fisik dan verbal, intimidasi dan ancaman, serta dikriminalisasi melalui penuntutan, investigasi dan penangkapan yang tidak adil.⁶

KEKERASAN BERBASIS GENDER

Perjuangan para pembela hak-hak perempuan dalam beberapa tahun terakhir menjadi awal penerapan beberapa langkah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Meskipun demikian, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terus berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Perlindungan hukum untuk mencegah dan memerangi kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga, telah diperkuat pada tahun 2023 di negara-negara termasuk Jepang, Makedonia Utara, Swiss, dan Uzbekistan. Namun, pihak berwenang di seluruh dunia secara sistematis gagal mengatasi kekerasan berbasis gender yang sudah mengakar dan impunitas yang sering dinikmati para pelakunya, serta mengabaikan kebutuhan jangka panjang para penyintas kekerasan seksual. Di Meksiko, sekiranya ada sembilan perempuan dibunuh setiap hari pada tahun 2023. Di negara-negara termasuk Aljazair dan Tunisia, perempuan menjadi sasaran “pembunuhan demi kehormatan” (*honour killing*) atau pembunuhan terhadap perempuan oleh anggota keluarga, biasanya laki-laki, dengan alasan menyelamatkan ‘kehormatan’ keluarga. Dampak buruk dari praktik-praktik berbahaya ini misalnya terjadi pada tahun 2023, yaitu kematian seorang anak berusia 16 tahun yang mengakhiri hidupnya untuk menghindari pernikahan paksa di Niger dan seorang anak berusia dua tahun yang menjadi korban mutilasi alat kelamin perempuan di Sierra Leone pada tahun 2023.

HAK-HAK KELOMPOK RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS (LGBTI)

Perlindungan hak kelompok ragam gender dan seksualitas (LGBTI) mengalami sedikit kemajuan di beberapa negara. Di waktu yang bersamaan, serangan terhadap hak LGBTI meningkat di negara lainnya.

Terdapat perubahan positif terhadap undang-undang atau kebijakan di beberapa negara pada tahun 2023. Di Meksiko, pernikahan sesama jenis disahkan di semua 32 negara bagian. Di Latvia, pihak berwenang mengakui kemitraan sipil (*civil partnership*). Di Taiwan, pihak berwenang mengakui hak sebagian besar pasangan sesama jenis transnasional untuk menikah. Mahkamah Agung Namibia memutuskan bahwa warga negara Namibia yang melakukan pernikahan sesama jenis di luar negeri dapat mengatur status imigrasi mereka sendiri. Di Finlandia, Jerman, dan Spanyol, pihak berwenang memfasilitasi penentuan gender diri sendiri.

Namun, sebanyak 62 negara di seluruh dunia masih memiliki undang-undang, banyak di antaranya merupakan warisan era penjajahan, yang memidanakan hubungan seksual sesama jenis.⁷ Pada tahun 2023, ada gelombang tindakan hukum atau usulan untuk mengurangi hak kelompok ragam gender dan seksualitas. Undang-undang baru di Uganda memperkenalkan hukuman mati untuk pelanggaran “homoseksualitas yang berat”. Di Ghana, parlemen menyetujui Rancangan Undang-Undang “Anti-Gay”. Rusia mengadopsi legislasi transfobik, Bulgaria mengakhiri pengakuan hukum atas gender kelompok transgender, dan Inggris menghalangi Rancangan Undang-Undang Reformasi Pengakuan Gender Skotlandia. Di India, Mahkamah Agung menolak memberikan pengakuan hukum kepada pernikahan sesama jenis.

Telah terjadi penangkapan dan penuntutan terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas di berbagai wilayah dan pembatasan terhadap organisasi yang membela hak kelompok ragam gender dan seksualitas. Pada tahun 2023, sejumlah orang ditangkap dan, dalam beberapa kasus, dipenjarakan dengan landasan ketentuan hukum yang mengkriminalisasi hubungan seksual dengan persetujuan sesama jenis, misalnya di Burundi, Mesir, Libya, dan Tunisia, atau karena menyelenggarakan pernikahan atau pesta untuk pasangan sesama jenis di Nigeria. Di Tiongkok, sebuah organisasi LGBTI yang cukup terpendang terpaksa ditutup dalam rangka kampanye anti-LGBTI yang sedang digalang pemerintah. Rusia melarang segala aktivitas publik yang berhubungan dengan hak kelompok ragam gender dan seksualitas dengan label “ekstrimis” dan diasosiasikan secara tidak jelas dengan “gerakan LGBT internasional”.

Tindak kekerasan kriminal terhadap kelompok LGBTI di banyak wilayah masih terjadi dan belum dihukum. Di Guatemala, di mana pernikahan sesama jenis masih ilegal, terdapat setidaknya 34 orang tewas karena orientasi seksual atau identitas gender mereka. Di Lebanon, pihak berwenang memprovokasi kekerasan terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas. Di Irak, pihak berwenang memerintahkan media untuk mengganti istilah "homoseksualitas" dengan "penyimpangan seksual".

Semua pemerintah harus mendukung keadilan gender dan gerakan bersama untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi. Pemerintah harus memprioritaskan program untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan memenuhi kebutuhan jangka panjang para korban. Pemerintah wajib mengadvokasi pencabutan undang-undang dan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas.

PENGARUH KRISIS EKONOMI DAN PERUBAHAN IKLIM

Krisis ekonomi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan mempengaruhi komunitas marjinal secara tidak berimbang. Pembela HAM yang mengkampanyekan hak bagi komunitas terdampak juga menjadi sasaran pembungkaman kebebasan berpendapat yang lebih luas.

HAK SOSIAL DAN EKONOMI

Kombinasi dari konflik, perubahan iklim dan akibat dari pandemi Covid-19 telah menjadi sumber dari rangkaian krisis ekonomi. Ketika 4,1 miliar orang tidak dijamin oleh perlindungan sosial selain jaminan kesehatan, krisis tersebut berdampak pada penegakan HAM, seperti meningkatnya kerawanan pangan dan bahan bakar. Krisis tersebut secara serius mengancam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yang telah setengah berjalan pada 2023. Laporan dari Sekretaris Jendral PBB pada April 2023 menyatakan bahwa “dari 140 sasaran yang terdata, hanya sekitar 12 persen yang masih berjalan sesuai rencana”. Alhasil, 575 juta orang akan hidup dalam kemiskinan ekstrim pada 2030 meskipun meski salah satu tujuan SDGs adalah pengentasan kemiskinan seutuhnya.

Guncangan ekonomi telah memperdalam hutang negara-negara yang telah mengalami krisis hutang. Menurut laporan World Bank pada Desember 2023, sekitar 60 persen dari negara berpendapatan rendah berada dalam atau berisiko tinggi mengalami kesulitan hutang. Banyak negara menghabiskan dana besar, yang sejatinya dibutuhkan untuk memenuhi HAM, demi membayar hutang yang terus meningkat. Beberapa negara dalam risiko kesulitan hutang parah adalah Mesir, Ethiopia, Ghana, Kenya, Pakistan, Sri Lanka, Tunisia, Ukraina, dan Zambia.

Meski Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan penurunan harga pangan global dibandingkan dengan puncak kenaikan harga di tahun 2022, harga tersebut masih tetap sangat tinggi dibandingkan dengan periode sebelum invasi Rusia di Ukraina pada Februari 2022. Bahkan harga di banyak pasar masih terus meningkat. Pada titik-titik yang berbeda tahun 2023,

diperkirakan 78 persen populasi Sierra Leone mengalami kerawanan pangan, 46 persen populasi Sudan Selatan berisiko tinggi mengalami kerawanan pangan, dan 5 juta penduduk di Somalia mengalami krisis pangan. Menurut WHO, pada pertengahan Desember sebanyak 93 persen penduduk Gaza mengalami kelaparan yang membuat mereka rentan terhadap kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat disembuhkan, khususnya perempuan hamil dan menyusui.

Beberapa negara mengambil langkah untuk mengubah pajak global dan bentuk pengelolaan ekonomi lainnya demi terwujudnya penegakan hak-hak ekonomi dan sosial. Telah terjadi kemajuan dalam membangun rezim perpajakan global yang lebih adil untuk membantu memobilisasi sumber daya untuk negara dengan pendapatan yang lebih rendah. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan proses dua langkah pembahasan Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional yang Efektif dan Inklusif. Resolusi tersebut diusulkan oleh Nigeria dan mendapat dukungan sangat besar, meskipun ditentang oleh beberapa negara berpendapatan tinggi termasuk negara-negara Uni-Eropa, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.⁸

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT

Fenomena cuaca ekstrim dan krisis akibat perubahan iklim yang terjadi perlahan namun semakin intens telah mempengaruhi berbagai negara, tetapi secara tidak proporsional mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah. Pemerintah dan aktor korporasi telah gagal untuk mengatasi atau mencegah degradasi lingkungan yang akut.

Pemerintah yang memiliki sejarah emisi tinggi dan terikat oleh prinsip hukum tentang tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibility* atau CBDR), tidak banyak berupaya menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan faktor pendorong perubahan iklim lainnya. Banyak yang justru memperluas infrastruktur bahan bakar fosil, termasuk dengan pendanaan publik.

Pemilihan Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah dari konferensi perubahan iklim terakhir, COP28, terbukti kontroversial karena Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi yang dikepalai oleh presiden COP28 telah mengumumkan rencananya untuk secara agresif memperluas produksi bahan bakar fosil. Kesepakatan COP28 untuk “beralih” dari bahan bakar fosil merupakan kali pertama bahan bakar fosil disebut dalam pengambilan keputusan COP. Namun, kesepakatan tersebut masih jauh dari kebutuhan dan meninggalkan celah yang memungkinkan produsen bahan bakar fosil dan negara untuk melanjutkan proses bisnis seperti biasa.⁹ Sementara itu, komitmen sebesar 700 juta dolar AS yang dibuat berbagai negara saat COP28 untuk sebuah mekanisme bernama Dana Kerugian dan Kerusakan, yang dibentuk untuk membantu komunitas di negara berpenghasilan rendah yang menderita akibat perubahan iklim, tidaklah cukup.¹⁰

Meski begitu, terdapat beberapa perkembangan positif. Sejumlah pengadilan nasional dan regional, termasuk pengadilan di Siprus, Irlandia, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, telah mengakui hak kelompok dan individu untuk mengajukan klaim bahwa pemerintah tidak melakukan aksi yang memadai untuk mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Hal ini berpotensi mendorong pertanggung jawaban pemerintah dan perusahaan bahan bakar fosil atas kerugian tertentu dan meletakkan dasar bagi litigasi perubahan iklim yang lebih luas. Sementara pada bulan Maret 2023, Majelis Umum PBB mendukung Vanuatu dan negara-negara kepulauan di Pasifik lainnya dengan meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat hukum terkait kewajiban dan tanggung jawab negara mengenai perubahan iklim.¹¹

DAMPAK YANG TIDAK PROPORSIONAL BAGI MASYARAKAT TERMARJINALKAN

Kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi, termasuk masyarakat adat dan kelompok-kelompok lain yang mengalami diskriminasi interseksional, telah menderita secara tidak

proporsional akibat pelanggaran HAM yang berkaitan dengan krisis ekonomi, perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Pelanggaran tidak proporsional ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dampak kumulatif dari diskriminasi struktural di masa lalu hingga sekarang, dan diskriminasi secara langsung. Akibatnya, komunitas termarginalkan di berbagai negara sering kali tidak mampu memperoleh akses kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya termasuk air minum, makanan yang cukup, dan listrik.

Tingginya angka kematian di antara etnis Rohingya akibat Topan Mocha yang melanda Myanmar pada bulan Mei 2023, sebagian besar disebabkan oleh kondisi hidup yang memprihatinkan sejak pengusiran paksa pada tahun 2012. Kesehatan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan pekerja sektor informal sangat terpengaruh oleh perubahan iklim yang menyebabkan gelombang panas di Pakistan. Masyarakat adat dan kelompok lain yang termarginalkan terdampak luar biasa oleh degradasi lingkungan yang berkaitan dengan proyek ekstraktif skala besar di berbagai wilayah termasuk di Amerika dan Asia.

PEMBELA HAM

Pembela HAM yang mengkampanyekan hak-hak orang-orang yang terkena dampak buruk krisis ekonomi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan terus menjadi sasaran oleh pemerintah dan aktor non-negara.

Serikat perdagangan yang melakukan kampanye untuk melindungi pekerja yang menghadapi dampak krisis ekonomi dan mereka yang mengkritik Langkah pemerintah menghadapi krisis ekonomi menjadi sasaran di banyak negara mulai dari Mesir hingga Korea Selatan. Di Afrika Barat dan Tengah, para pembela HAM yang memerangi korupsi, yang merupakan penguras aset yang signifikan, diancam, dipenjara, atau dibunuh.¹²

Salah satu pola represi terhadap perlawanan terlihat dari persekusi, intimidasi, dan pembunuhan sejumlah pembela HAM. Tiga orang dari komunitas Guapinol di Honduras dibunuh pada tahun 2023. Mereka melakukan kampanye melawan perusahaan pertambangan untuk melindungi sungai yang menjadi sumber kehidupan mereka. Para pembela HAM juga termasuk di antara mereka yang terdampak oleh undang-undang atau peraturan baru yang membatasi kebebasan berekspresi atau berkumpul yang mulai berlaku pada tahun 2023 di negara-negara seperti Bangladesh, Tiongkok, Kuba, Hongaria, India, Yordania, Pakistan, Papua Nugini, Singapura, dan Inggris.

Masyarakat Adat, aktivis iklim, dan pembela HAM dan lingkungan menghadapi penangkapan massal dan dituntut ketika melakukan aksi damai. Saat melakukan protes, mereka, seperti banyak aktivis lainnya, dikriminalisasi atau dihadapkan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Penggunaan proyektil kinetik dan jenis proyektil lainnya terhadap para pengunjung rasa telah menyebabkan ribuan korban luka-luka di seluruh dunia, termasuk disabilitas permanen dan kematian.¹³ Berlanjutnya militerisasi polisi memperparah risiko ini. Produsen senjata tidak mematuhi terus memasok produk-produk tersebut secara tidak bertanggung jawab kepada pasukan keamanan yang diketahui kerap menyalahgunakan secara ilegal senjata tersebut.¹⁴ Oleh karena itu, penting untuk menjaga momentum pembentukan perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengendalikan perdagangan peralatan penegakan hukum. Pada tahun 2023, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, dan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan telah menyatakan dukungan mereka untuk Perjanjian Perdagangan Bebas Penyiksaan.

Pemerintah dan lembaga keuangan internasional seharusnya menerapkan keringanan hutang, termasuk pembatalan hutang bagi negara-negara yang tidak mampu memenuhi kewajiban HAM mereka karena pembayaran utang yang tinggi. Mereka seharusnya

berinvestasi dalam program perlindungan sosial universal yang memenuhi hak atas jaminan sosial bagi semua orang dan bekerja sama untuk mendirikan Dana Perlindungan Sosial Global yang diusulkan untuk mendukung negara-negara berpendapatan rendah.¹⁵ Pemerintah seharusnya bekerja sama untuk mendirikan sebuah konvensi pajak PBB. Mereka harus berkomitmen untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil sepenuhnya, secara cepat, dan adil sebagai bagian dari paket transisi energi yang lebih luas. Mereka harus berusaha untuk mencapai Perjanjian Perdagangan Bebas Penyiiksaan PBB. Mereka harus menjamin perlindungan bagi para pembela HAM.

ANCAMAN TEKNOLOGI BARU DAN YANG SUDAH ADA

Munculnya alat kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) generatif telah menjadi berita utama dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai pemberitaan menyoroti ancaman yang AI generatif dan teknologi yang sudah ada berikan terhadap HAM, khususnya hak-hak kelompok marjinal. Negara-negara belum mengambil langkah yang memadai untuk mengendalikan perdagangan global perangkat lunak mata-mata (*spyware*) atau model bisnis berbasis surveilans dari perusahaan teknologi terbesar yang dikenal sebagai Big Tech.

RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KECERDASAN BUATAN

Peluncuran ChatGPT-4 di 2023, sebuah alat yang dapat menghasilkan dan memadukan teks, memunculkan perhatian pada bagaimana AI generatif dapat mengubah kehidupan kerja masyarakat, akses ke layanan pemerintah, dan pengalaman menggunakan internet. Seperti teknologi baru lainnya, AI generatif dapat menciptakan peluang, tetapi tanpa regulasi yang memadai dan efektif, juga dapat memperburuk risiko terhadap HAM di bidang-bidang seperti akses terhadap kesejahteraan, pendidikan dan pekerjaan, hak-hak buruh, privasi, dan keamanan daring. Risiko-risiko tersebut termasuk ketidaksetaraan rasial dan lainnya, peningkatan surveilans, dan penguatan konten kebencian di dunia maya.¹⁶

Sistem AI dan teknologi lainnya telah memperkuat ketidaksetaraan dan merugikan komunitas-komunitas yang terpinggirkan dalam hal akses ke layanan negara, pemolisian, keamanan, dan migrasi.¹⁷ Di Serbia, sistem kesejahteraan sosial semi-otomatis baru yang didanai oleh Bank Dunia, mengakibatkan kemungkinan ribuan orang kehilangan akses ke bantuan sosial dan secara tidak proporsional mempengaruhi komunitas Roma dan orang dengan disabilitas. Penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh Israel di wilayah Palestina yang diokupasi telah memperkuat pembatasan atas kebebasan bergerak dan sistem apartheid. Departemen Kepolisian New York mengungkap pada tahun 2023 bahwa mereka menggunakan teknologi ini untuk mengawasi protes Black Lives Matter di kota tersebut. Alhasil, tekanan meningkat pada Dewan Kota New York untuk melarang praktik tersebut. Sementara itu, perusahaan modal ventura yang berinvestasi dalam teknologi baru sering kali gagal dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati HAM.¹⁸

PERDAGANGAN GLOBAL PERANGKAT LUNAK MATA-MATA

Negara-negara telah gagal mengekang perdagangan global *spyware*. Penelitian oleh Amnesty International pada tahun 2023 mengungkap penggunaan *spyware* Pegasus terhadap jurnalis dan masyarakat sipil di Armenia, Republik Dominika, India, dan Serbia. Sebuah investigasi besar mengenai Predator Files oleh European Investigative Collaborations, bekerja sama dengan Amnesty International, mengungkap bagaimana *spyware* yang "berbasis dan diatur di Uni Eropa" ternyata secara bebas dijual kepada negara-negara di seluruh dunia.¹⁹ Setelah pengungkapan ini, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi pada November 2023 yang mengkritik kurangnya tindakan untuk menekan penyalahgunaan oleh industri *spyware*. Resolusi ini memperkuat sikap beberapa pembuat kebijakan, termasuk pernyataan dari 11 negara pada Maret 2023 yang mengakui ancaman *spyware* terhadap HAM.

PELANGGARAN-PELANGGARAN OLEH BIG TECH

Bahaya dari model bisnis berbasis surveilans para Big Tech terungkap kembali pada tahun 2023, tidak hanya dalam konteks konflik bersenjata, tetapi juga dalam bagaimana mereka melanggar hak-hak anak-anak dan kaum muda lainnya. Sistem rekomendasi konten dan praktik pengumpulan data yang invasif dari TikTok menimbulkan bahaya bagi pengguna muda platform tersebut dengan memperkuat konten depresi dan bunuh diri yang berpotensi memperburuk tantangan yang dihadapi isu kesehatan mental.²⁰ Terjadi pula peningkatan yang mengkhawatirkan dalam penyaluran hasutan kebencian terhadap orang LGBTI di X (sebelumnya Twitter).²¹ Penyebaran misinformasi dan disinformasi politik kemungkinan akan meningkat dan menimbulkan risiko yang sangat serius mengingat banyaknya proses pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2024. Beragam kekuatan politik represif di dunia menggunakan media sosial sebagai senjata untuk menyerang minoritas dan memicu konflik horizontal demi meningkatkan peluang memenangkan pemilu. Upaya tersebut difasilitasi dan diperparah oleh algoritma media sosial dan model bisnis Big Tech yang memprioritaskan "keterlibatan (*engagement*)" dan keuntungan dengan segala cara. Risiko-risiko tersebut diperparah oleh munculnya AI generatif.

Beberapa pembuat kebijakan dan korban sedang berupaya mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Pada Juli 2023, Mahkamah Uni Eropa (*Court of Justice of the EU*) mengeluarkan putusan besar yang melawan model bisnis berbasis surveilans yang digunakan Meta, perusahaan yang memiliki Facebook dan Instagram. Tak lama setelah itu, otoritas Norwegia memerintahkan Meta untuk menghentikan penayangan iklan yang dipersonalisasi berdasarkan aktivitas daring dan lokasi pengguna di Norwegia. Di Uni Eropa, masyarakat sipil fokus mendorong penerapan peraturan pertama di dunia yang mengatur Big Tech dan menjanjikan penghormatan terhadap HAM, yakni Undang-Undang Layanan Digital 2022. Terlepas dari beberapa kemajuan tersebut, ada kesempatan yang terlewatkan untuk mengatasi risiko teknologi AI. Di tahun 2023, Uni Eropa meluncurkan Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa, tetapi teks akhir peraturan ini tidak cukup kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang dan bahkan berpotensi berkontribusi pada perluasan dan legitimasi kegiatan surveilans oleh kepolisian dan otoritas migrasi.

Pemerintah harus dengan segera melarang spyware invasif dan teknologi pengenalan wajah. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah legislatif dan regulatif untuk mengatasi risiko dan kerugian yang disebabkan oleh teknologi AI. Pemerintah wajib mengendalikan Big Tech, terutama dengan mengatasi kerugian dari model bisnis berbasis surveilans.

RINGKASAN KAWASAN ASIA – PASIFIK

Terdapat sedikit kemajuan dalam hal hak-hak perempuan dan kelompok ragam gender dan seksualitas di beberapa negara; undang-undang baru yang mengkriminalisasi penyiksaan dan penghilangan paksa diadopsi di Thailand, dan penghapusan hukuman mati wajib di Malaysia. Namun, secara keseluruhan, prospek hak asasi manusia di kawasan Asia-Pasifik masih suram.

Meningkatnya konflik bersenjata di Myanmar mengakibatkan lebih banyak lagi kematian dan pengungsian warga sipil. Di Afghanistan, Taliban meningkatkan penindasan mereka terutama terhadap perempuan dan anak perempuan. Namun, meningkatnya intoleransi terhadap perbedaan pendapat terlihat jelas di Sebagian besar kawasan seiring dengan semakin ketatnya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat di banyak negara dan wilayah. Mereka yang kritis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk pembela hak asasi manusia, aktivis politik, dan jurnalis ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, dan protes terhadap ketidakadilan seringkali ditanggapi dengan kekerasan yang melanggar hukum dan terkadang mematikan.

Pola diskriminasi yang sudah berlangsung lama terhadap kelompok agama dan etnis minoritas serta kelompok kasta rendah, perempuan, dan anak perempuan, kelompok ragam gender dan seksualitas, dan masyarakat adat masih terus berlanjut. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok ini dan kelompok marginal lainnya adalah kelompok yang paling terkena dampaknya di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Negara-negara ini juga merupakan negara pertama yang terkena dampak mematikan akibat peristiwa cuaca yang disebabkan oleh perubahan iklim, namun pemerintah di kawasan ini gagal mengambil tindakan efektif untuk menahan emisi karbon atau menerapkan langkah-langkah perlindungan dan adaptasi yang efektif.

KEBEBASAN BERESKPRESI

Hak atas kebebasan berekspresi masih berada dalam ancaman mengingat banyak pemerintahan meningkatkan tindakan keras terhadap media, pembela hak asasi manusia, partai oposisi, pengkritik pemerintah, dan lain-lain.

Beberapa negara mempertahankan atau mengintensifikan pembatasan yang sudah ekstrim. Di Afghanistan, jurnalis dan pekerja media lainnya termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran pelecehan dan penahanan sewenang-wenang, dan semakin banyak media yang ditutup atau dipaksa menutup kantornya. Di Myanmar, jurnalis termasuk di antara mereka yang dijatuhi hukuman penjara jangka panjang dalam persidangan yang tidak adil. Di Korea Utara, kontrol tetap pemerintah atas ruang sipil tidak pernah berhenti dan hukuman berat dijatuhkan kepada siapa pun yang mengkritik pemerintah atau terlibat dalam ideologi “reaksioner”.

Di tempat lain, upaya pemerintah untuk membungkam suara-suara kritis dilakukan dalam berbagai bentuk. Undang-undang atau peraturan baru yang membatasi kebebasan berekspresi mulai berlaku di Bangladesh, China, India, Pakistan, Papua Nugini, dan Singapura. Pemerintahan baru di Fiji mencabut undang-undang yang membatasi kebebasan media, namun undang-undang lain yang membatasi kebebasan media masih tetap ada.

Di Kamboja, izin salah satu dari sedikit media independen yang tersisa telah dicabut. Pemerintah India mempersenjatai Lembaga Keuangan dan Investigasi Pusat untuk melakukan penggerebakan dan menangguk izin media dan organisasi hak asasi manusia. Bhutan, di mana pegawai negeri

dilarang berbagi informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik kepada media, mengalami penurunan peringkat kebebasan pers global.

Teknologi sensor dan surveilans semakin banyak digunakan untuk menekan perbedaan pendapat. Di China, pedoman-pedoman baru memberikan pembatasan lebih lanjut terhadap pengguna media sosial, sementara perusahaan media social mewajibkan pengguna tertentu untuk mengungkapkan identitas mereka, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai hak privasi. Di Hong Kong, undang-undang keamanan nasional yang kejam dan undang-undang penghasutan era kolonial digunakan untuk menyensor buku, lagu, media sosial, dan konten daring dan luring lainnya. Di Vietnam, Amnesty International menemukan bahwa agen-agen negara, atau orang-orang yang bertindak atas nama mereka, kemungkinan besar berada di balik kampanye yang menargetkan puluhan akun media sosial menggunakan *spyware* Predator, sementara pemerintah Thailand gagal mengatasi kekhawatiran mengenai penggunaan *spyware* Pegasus yang mengancam pembela hak asasi manusia, politisi, dan aktivis masyarakat sipil.

Judicial harassment terhadap mereka yang berbagi informasi atau menyatakan pandangan yang kritis atau dianggap sensitive oleh pemerintah juga merupakan hal yang biasa. Jurnalis dan aktivis di Vietnam diadili dan dipenjara karena “menyebarkan propaganda melawan negara”. Di Maladewa, jurnalis ditangkap karena melaporkan protes dan peristiwa lainnya. Di Malaysia, pemerintah tidak hanya gagal memenuhi janjinya untuk mencabut undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, namun juga terus menggunakan undang-undang tersebut untuk menyelidiki para pembuat film dan editor buku. Di Thailand, pihak berwenang tetap menerapkan undang-undang yang membatasi komunikasi onlune untuk mengadili para pengkritik, sementara pengkritik pemerintah di Filipina terus menghadapi tuduhan palsu. Seruan damai untuk kemerdekaan Papua masih merupakan pelanggaran yang tidak bisa ditahan di Indonesia. Di Laos, pola intimidasi, penahanan sewenang-wenang serta pembunungan di luar hukum, dan penghilangan paksa terhadap pembela hak asasi manusia terus berlanjut. Demikian pula di Pakistan, jurnalis, pembela hak asasi manusia dan pengkritik pemerintah dan pihak militer termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa.

Ada tanda-tanda bahwa penindasan transnasional terhadap perbedaan pendapat semakin mengakar. Pihak berwenang China dan Hongkong mengejar para aktivis, termasuk warga negara yang melarikan diri ke luar negeri, mengeluarkan surat perintah penangkapan, menawarkan imbalan finansial dan menekan negara lain untuk memulangkan mereka. Dua pembela hak asasi manusia yang kembali dari Laos kemudian ditahan di China. Pihak berwenang Vietnam terlibat dalam penculikan seorang Youtuber termuka di Thailand, sementara seorang pembela hak asasi manusia asal Laos ditembak mati di Thailand.

Pemerintah harus mencabut semua undang-undang dan peraturan yang mengkriminalisasi atau membatasi ekspresi yang sah, mengakhiri semua investigasi atau penuntutan yang tidak dapat dibenarkan terkait dengan pelaksanaan sah hak atas kebebasan berekspresi, dan menghormati kebebasan media.

KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT SECARA DAMAI

Dengan pengecualian di Fiji, di mana terdapat tanda-tanda toleransi yang lebih besar, pemerintah di seluruh wilayah ini semakin berupaya untuk membatasi hak untuk berkumpul secara damai.

Di Thailand, tuntutan pidana telah diajukan terhadap setidaknya 2.000 orang pada akhir tahun ini sehubungan dengan partisipasi mereka dalam protes reformasi politik dan sosial yang dimulai pada tahun 2020. Jumlah orang yang ditahan karena ikut serta dalam acara untuk memperingati korban kebakaran dari sebuah apartemen di Urumqi, China, pada tahun 2022 dan protes terkait pembatasan Covid-19 mungkin tidak akan pernah diketahui, namun ada laporan tentang pelecehan yang sedang berlangsung terhadap para peserta dan seorang pelajar Uyghur dijatuhi

hukuman tiga tahun penjara karena memposting video protes tersebut di media sosial. Di Malaysia dan Mongolia, pihak berwenang terus menggunakan undang-undang yang represif untuk membatasi hak melakukan protes damai, sementara di Korea Selatan, semakin kerasnya tindakan terhadap protes “illegal” yang menyebabkan tuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi oleh perusahaan milik negara terhadap aktivis hak-hak disabilitas. Di Myanmar, puluhan orang ditangkap karena mengenakan bunga untuk memperingati ulang tahun mantan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang sedang di dalam tahanan.

Penggunaan kekuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan cedera dan terkadang kematian masih sering terjadi. Di Afghanistan, Taliban dilaporkan menggunakan senjata api, meriam air, dan senjata kejut listrik (*stun gun*) untuk membubarkan demonstrasi, termasuk, antara lain, protes untuk mendukung hak-hak perempuan. Pihak berwenang di Pakistan dan Sri Lanka berusaha untuk melarang protes dan sering kali menggunakan kekerasan yang berlebihan dan melanggar hukum terhadap para pengunjung rasa – yang mengakibatkan kematian dan banyak cedera di kedua negara. Di Bangladesh, polisi menggunakan peluru karet, peluru tajam, dan gas air mata terhadap protes yang dipimpin oposisi sehingga mengakibatkan setidaknya satu kematian. Ribuan orang juga ditangkap. Pasukan keamanan juga menggunakan kekerasan yang melanggar hukum terhadap pengunjung rasa di Indonesia, Maladewa, dan Nepal.

Pembatasan terhadap kebebasan berserikat juga semakin parah di beberapa negara. Di Kamboja, satu-satunya partai oposisi yang didiskualifikasi dari pemilu dan seorang politisi oposisi terkemuka dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Di Filipina, organisasi-organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan termasuk di antara mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok komunis terlarang atau “ditandai merah”, sehingga menjadikan anggota mereka rentan terhadap tuduhan palsu, pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Di Korea Selatan, serikat pekerja menghadapi lingkungan yang semakin tidak bersahabat dan puluhan aktivis buruh dimasukkan ke dalam penyelidikan kriminal.

Pemerintah harus menghormati dan memfasilitasi pelaksanaan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai. Pekerjaan para pembela hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi serta lingkungan yang aman dan mendukung pekerjaan mereka harus terjamin.

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG

Pembela hak asasi manusia, aktivis politik dan lingkungan hidup serta pihak-pihak lainnya ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang karena menentang kebijakan dan tindakan pemerintah atau atas dasar etnis, agama atau identitas lainnya.

Di China, penahanan sewenang-wenang dan peradilan yang tidak adil terhadap warga Uyghur dan orang-orang dari etnis minoritas Muslim lainnya di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang terus berlanjut. Di Myanmar, lebih dari 20.000 orang masih ditahan karena menentang kudeta militer tahun 2021 dan persidangan yang sangat tidak adil terus berlanjut.

Di Pakistan, pihak berwenang menggunakan Undang-undang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Undang-undang Anti-Terrorisme yang tidak jelas untuk secara sewenang-wenang menahan lebih dari 4.000 orang yang terlibat dalam protes menyusul penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan pada bulan Mei. Sekitar 103 warga sipil lainnya, termasuk para pemimpin politik dan aktivis, diadili di pengadilan militer. Meskipun pengadilan di India memberikan jaminan atau membatalkan perintah penahanan terhadap beberapa jurnalis yang ditahan secara sewenang-wenang di Jammu dan Kashmir, para pembela hak asasi manusia di sana dan di tempat lain di negara tersebut terus ditahan tanpa diadili, seringkali selama bertahun-tahun.

Di Mongolia, jaminan prosedural yang tidak memadai mengakibatkan tingginya jumlah penangkapan tanpa surat perintah.

Pemerintah harus mengakhiri semua penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap pengkritik pemerintah dan pihak-pihak lainnya dan segera membebaskan siapa pun yang ditahan semata-mata karena menjalankan hak mereka secara damai atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, berserikat, atau hak asasi manusia lainnya.

IMPUNITAS DAN HAK ATAS KEADILAN

Impunitas masih tersebar luas dan para korban sering kali tidak diberi hak atas keadilan, kebenaran, dan reparasi.

Meskipun keputusan Mahkamah Pidana Internasional untuk melanjutkan penyelidikan di Filipina memberikan harapan bagi keluarga korban pembunuhan di luar hukum yang tak terhitung jumlahnya selama “perang terhadap narkoba” yang sedang berlangsung, pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Filipina masih sulit dilakukan. Di Thailand, impunitas berlaku untuk pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan negara. Pemerintah Sri Lanka dan Nepal kembali gagal membuat kemajuan signifikan dalam memberikan keadilan, kebenaran dan reparasi kepada puluhan ribu korban kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya selama konflik bersenjata internal.

Pemerintah harus mengatasi impunitas dengan melakukan investigasi menyeluruh, independen, imparial, terhadap kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya, dan dengan membawa tersangka pelaku ke pengadilan yang adil. Kerja sama penuh harus diperluas pada investigasi internasional dan proses peradilan serta reparasi yang diberikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu.

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional terus terjadi di Myanmar, di mana serangan udara dan darat yang tidak pandang bulu dan ditargetkan oleh militer dan milisi terkait tersebar di seluruh negeri yang mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian warga sipil. Ada juga laporan mengenai serangan yang dilakukan oleh kelompok oposisi bersenjata terhadap warga sipil yang terkait dengan otoritas militer Myanmar. Dalam konteks perlawanan bersenjata yang sedang berlangsung terhadap Taliban di provinsi Panjshir, Afghanistan, terdapat bukti baru mengenai penerapan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil dan eksekusi di luar hukum terhadap para pejuang Front Perlawanan Nasional yang ditangkap, sementara serangan dilakukan oleh kelompok bersenjata, terutama ISIS Provinsi Khorasan, mengakibatkan ribuan korban jiwa.

Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk dengan mengakhiri serangan tanpa pandang bulu atau serangan langsung terhadap warga sipil atau infrastruktur sipil.

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Beberapa negara masih terperosok dalam krisis ekonomi yang serius. Melonjaknya inflasi di Laos dan Pakistan dan kenaikan biaya hidup berdampak pada kelompok yang paling rentan terhadap marginalisasi. Di Sri Lanka, di mana lebih dari seperempat penduduknya berisiko jatuh di bawah garis kemiskinan, akses terhadap makanan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi tantangan sehari-hari, terutama bagi mereka yang berpenghasilan harian dan warga Tamil Malaiyaha. Krisis kemanusiaan di Afghanistan semakin parah, menimbulkan kekhawatiran akan semakin banyaknya orang yang bergantung pada bantuan kemanusiaan – namun rencana tanggap kemanusiaan masih sangat kekurangan dana.

Di Papua Nugini, kekurangan sumber daya dalam sistem kesehatan menyebabkan sebagian besar penduduk tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai. Kerawanan pangan masih terjadi di Korea Utara dan layanan kesehatan termasuk obat-obatan penting dan vaksin seringkali tidak tersedia.

Penggusuran paksa dan pembongkaran rumah menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan menjadi miskin atau berisiko terkena dampaknya. Di Kamboja, proses pengusiran paksa 10.000 keluarga dari Situs Warisan Dunia UNESCO Angkor terus berlanjut. Hampir 300.000 orang kehilangan tempat tinggal di India setelah pembongkaran rumah-rumah informal; pemukiman di Delhi menjelang KTT G20 dan pembongkaran rumah, tempat usaha dan tempat ibadah yang sebagian besar penduduknya Muslim terus berlanjut sebagai hukuman atas kekerasan komunal. Di Indonesia, pihak berwenang merespons dengan kekerasan yang berlebihan terhadap masyarakat yang memprotes rencana penggusuran dan proyek pembangunan infrastruktur, sementara di Laos, pembangunan bendungan mengancam akan menggusur ribuan penduduk desa, tanpa pengaturan kompensasi yang memadai.

Hak-hak budaya dan bahasa serta hak atas pendidikan bagi etnis minoritas di seluruh China, dirusak oleh kebijakan pemerintah termasuk kebijakan asimilasi yang menargetkan anak-anak Tibet dan Uighur.

Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dilindungi dan memastikan kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperburuk pelanggaran hak atas pangan, kesehatan, dan penghidupan.

AKUNTABILITAS PERUSAHAAN

Akuntabilitas oleh perusahaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan, sering kali masih tidak transparan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amnesty International mengenai Myanmar berkontribusi terhadap perkembangan positif, dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan pasokan bahan bakar penerbangan yang digunakan oleh militer Myanmar dalam serangan udara terhadap warga sipil, berhasil menghentikan keterlibatan mereka. Selain itu, Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain juga menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap beberapa perusahaan tersebut.

Pemerintah harus menerapkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dan mitra mereka tidak akan menyebabkan ataupun berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan bahwa segala kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas mereka dapat segera diperbaiki.

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Kebebasan beragama dan berkeyakinan masih terancam, terutama di Asia Tenggara. Di India, terjadi ratusan insiden kekerasan dan intimidasi kepada umat Muslim. Kekerasan yang terjadi terhadap agama minoritas juga marak terjadi di Pakistan. Tempat pemakaman Ahmadi dinodai dan tuduhan penistaan agama digunakan untuk menarget kelompok minoritas termasuk untuk membenarkan serangan terhadap lebih dari 20 gereja dalam satu hari. Di Afghanistan, agama minoritas termasuk Syiah dan Hazara Syiah, Sikh, Hindu, Kristen, Ahmadiyah, dan Ismaili menghadapi diskriminasi ekstrim di bawah Taliban. Pelajaran agama formal juga hanya didasarkan pada aliran Sunni Islam.

Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang efektif, termasuk reformasi hukum dan kebijakan jika diperlukan, untuk sepenuhnya melindungi dan mempromosikan kebebasan memeluk kepercayaan tanpa diskriminasi.

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Jepang diperkuat dengan diperluasnya definisi pemerkosaan dalam hukum pidana sehingga mencakup hubungan seksual tanpa persetujuan. Di Fiji, hambatan hukum terhadap partisipasi perempuan yang telah menikah dalam pemilihan umum dihapus.

Namun, hak-hak perempuan dan anak perempuan di kawasan tersebut masih diwarnai diskriminasi dan kekerasan yang sistematis. Laporan terjadinya pelecehan dan kekerasan, termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, terus terjadi di Asia Selatan hampir tanpa pertanggungjawaban. Di India, terdapat kekhawatiran khusus mengenai tingginya jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit, Adivasi, dan Kuki yang dilakukan oleh anggota kasta dominan.

Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Di Afghanistan, hak-hak perempuan dibatasi secara ekstrim dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka telah mencapai tingkat kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk persekusi berbasis gender. Di Nepal, perempuan masih menjadi korban pelanggaran hak kewarganegaraan yang setara. Di Bhutan, Fiji, Jepang, dan tempat lainnya, jumlah keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan angkatan kerja masih sangat sedikit.

Pemerintah harus mempercepat upaya untuk menegakkan dan mempromosikan hak-hak perempuan, mengakhiri diskriminasi interseksional dan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan, serta mencegah dan mengadili kekerasan berbasis gender.

HAK-HAK KELOMPOK RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS

Hak kelompok Ragam Gender dan Seksualitas mengalami kemajuan serta kemunduran. Pada 21 Desember di Taiwan, pemerintah telah mengakui hak sebagian besar pasangan sesama jenis transnasional untuk melakukan pernikahan, pembuat kebijakan Thailand juga telah memulai proses legalisasi pernikahan sesama jenis. Putusan pengadilan di Hong Kong, Nepal, dan Korea Selatan telah memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak pasangan sesama jenis dan/atau transgender. Namun, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan masih mempertahankan kriminalisasi terhadap hubungan seksual konsensual sesama jenis dalam militer. Selain itu, pemerintah pada umumnya memberikan tanggapan dengan mengajukan banding terhadap putusan yang mengakui hak-hak kelompok ragam gender dan seksualitas serta lambat dalam melaksanakan keputusan tersebut.

Ketidakpastian yang dialami oleh individu dan kelompok ragam gender dan seksualitas juga terjadi di Tiongkok, di mana sebuah organisasi LGBTI ditutup paksa dalam rangka kampanye anti-LGBTI yang sedang digalakkan pemerintah. Di Pakistan, kelompok politik dan islamis memimpin kampanye disinformasi yang mengancam perlindungan hukum bagi transgender (khawajasara) dan mengakibatkan peningkatan kekerasan dan pelecehan terhadap kelompok transgender dan ragam gender. Di India, Mahkamah Agung menolak memberikan pengakuan hukum untuk pernikahan sesama jenis. Di Malaysia, buku dan materi lainnya yang dianggap mempromosikan gaya hidup LGBTI dilarang dan di Mongolia pawai pro-LGBTI dilarang.

Pemerintah wajib mencabut undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi kelompok ragam gender dan seksualitas, termasuk menghentikan kriminalisasi hubungan sesama jenis konsensual, dan mengakui pernikahan sesama jenis, mempromosikan dan melindungi hak-hak kelompok ragam gender dan seksualitas dan memungkinkan mereka untuk hidup dengan aman dan terhormat.

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN DISKRIMINASI BERBASIS ETNIS DAN KASTA

Diskriminasi berbasis etnis dan kasta, serta diskriminasi terhadap Masyarakat Adat, masih tersebar luas. Di negara seperti Kamboja, Indonesia, dan Malaysia, eksploitasi bisnis di tanah-tanah adat mengancam kehidupan dan penghidupan terhadap Masyarakat Adat. Proses konsultasi bersama komunitas terdampak seringkali dilaksanakan tanpa menysasar permasalahan utama dan aktivis Masyarakat Adat rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Di Filipina, dua aktivis perlindungan lingkungan adat dihilangkan secara paksa dan pemimpin perlindungan hak Masyarakat Adat dilabeli sebagai teroris.

Kesempatan bersejarah untuk memajukan hak Masyarakat Adat First Nation di Australia lenyap usai penolakan jejak pendapat untuk memberikan perwakilan kepada Masyarakat Adat di parlemen. Sementara di Selandia Baru, Masyarakat Adat Māori terus mengalami diskriminasi dan dimarjinalkan, seperti dari meningkatnya angka anggota Masyarakat Adat tersebut yang berhadapan dengan hukum pidana. Di India, diskriminasi berdasarkan kasta terus berlanjut hingga sekarang.

Pemerintah harus memastikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi korban diskriminasi etnis dan kasta, mengakhiri impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum Dalit, Masyarakat Adat, dan kelompok-kelompok yang berada dalam ancaman risiko lainnya, serta memprioritaskan kebijakan dan program untuk menghapuskan diskriminasi struktural, termasuk dalam sistem peradilan pidana.

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA

Meski kriminalisasi atas penyiksaan dan penghilangan paksa di Thailand menunjukkan kekuatan kampanye yang digagas oleh para korban dan pembela hak asasi manusia, namun masih banyak yang perlu dilakukan di sana dan di tempat lain untuk mencegah penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lainnya.

Beberapa kasus penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap para tahanan dilaporkan terjadi di seluruh wilayah. Bahkan kematian di dalam tahanan juga sering terjadi. Di Bangladesh, setidaknya sebanyak 94 tahanan meninggal selama penahanan sepanjang tahun dan sedikitnya 10 orang di Malaysia. Di Nepal, pihak berwenang gagal bertanggung jawab atas banyaknya tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Di Afghanistan, penyiksaan terhadap tahanan juga terjadi secara meluas dan hukuman fisik berupa penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya di depan umum digunakan. Militer Indonesia sendiri harus bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kematian selama penahanan terhadap Orang Asli Papua, termasuk anak-anak.

Pemerintah wajib melarang dan mengkriminalisasi penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya serta mengambil langkah efektif untuk melindungi serta mencegah penyiksaan terhadap kelompok-kelompok marjinal dan kelompok yang berisiko. Apabila tindakan tersebut terjadi, negara wajib menyelidiki setiap tuduhan, meminta pertanggungjawaban terduga pelaku, dan menyediakan pemulihan bagi para korban.

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT

Banjir bandang, suhu yang melonjak, dan angin topan yang mematikan menunjukkan kerentanan kawasan ini terhadap peristiwa yang disebabkan oleh perubahan iklim. Namun, langkah-langkah kesiapsiagaan, adaptasi, dan mengurangi emisi karbon masih belum memadai. Seperti yang biasa terjadi, preseden ini mengakibatkan masyarakat yang paling miskin dan terpinggirkan menanggung konsekuensi paling berat atas kegagalan ini.

Tingginya angka kematian masyarakat Rohingya di Myanmar akibat topan yang melanda pada bulan Mei lalu sebagian besar disebabkan oleh kondisi mereka yang memprihatinkan sejak diusir

secara paksa pada tahun 2012. Di India, hampir 200 kasus kematian tercatat akibat banjir di wilayah Himalaya dan gelombang panas di negara bagian Uttar Pradesh dan Bihar. Pakistan terus mengalami gelombang panas akibat perubahan iklim yang berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan pekerja sektor informal.

Upaya mitigasi seperti target emisi yang ditetapkan oleh banyak negara, termasuk negara-negara penghasil emisi terbesar, masih belum cukup untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Kebijakan dan tindakan yang diambil seringkali tidak konsisten dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh negara-negara tersebut. Sebagai contoh, Taiwan telah mengadopsi undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk mengurangi emisi, tetapi mereka tidak memiliki lini masa untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil sementara eksplorasi minyak terus menerus berlanjut.

Hanya ada sedikit tanda untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dalam sistem energi di kawasan ini. Sebaliknya, pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan proyek-proyek pertambangan batu bara terus diberi persetujuan oleh pemerintah di Australia, Tiongkok, Indonesia, dan Korea Selatan, sekalipun ditentang kuat di dalam negeri. Sementara Jepang adalah satu-satunya negara industri di dunia yang belum berkomitmen untuk menghentikan penggunaan batu bara dalam produksi listrik.

Negara-negara berulang kali mengabaikan dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan dan Masyarakat Adat serta komunitas terdampak lainnya. Di Mongolia, misalnya, masih belum ada tindakan yang memadai untuk mengatasi dampak kegiatan pertambangan di wilayah Gobi terhadap kesehatan dan mata pencaharian masyarakat penggembala. Di Papua Nugini, pemerintah mengeluarkan izin untuk membuka kembali kegiatan tambang emas yang sebelumnya diduga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia serius dan kerusakan lingkungan meskipun masalah tersebut belum ditangani secara memadai oleh perusahaan yang terlibat.

Negara-negara industri dan negara penghasil emisi tinggi lainnya di kawasan harus memimpin aksi mitigasi iklim, termasuk dengan menghentikan perluasan produksi dan subsidi bahan bakar fosil, dan memastikan bahwa kebijakan iklim mereka konsisten dengan upaya untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C. Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam kesiapsiagaan dan aksi adaptasi bencana serta memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marjinal dan kelompok-kelompok lain yang terdampak oleh krisis iklim secara berlebihan.

HAK-HAK PENGUNSI DAN MIGRAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Pengadilan di Australia dan Korea Selatan telah menyatakan bahwa penahanan tanpa batas terhadap pengungsi dan pencari suaka tidak konstitusional. Meski demikian, perlindungan bagi pengungsi, pencari suaka, dan migran tetap tidak memadai dan hak asasi manusia mereka sering diabaikan.

Banyak pengungsi dan migran ditahan secara sewenang-wenang dan tanpa batas waktu yang jelas, termasuk di pusat-pusat penahanan imigrasi yang kumuh. Hak atas hunian yang memadai dan layanan dasar, serta kebebasan bergerak, juga tidak terpenuhi.

Pihak berwenang Malaysia gagal menyelidiki kematian 150 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, di pusat-pusat penahanan imigrasi pada tahun 2022. Saat ini, kekhawatiran tentang kondisi di pusat-pusat tersebut masih berlanjut. Di Bangladesh, kebakaran dan angin taifun di salah satu kamp pengungsi membuat ribuan pengungsi Rohingya kehilangan tempat tinggal. Di Thailand, meskipun mekanisme baru penyaringan pengungsi dan pencari suaka telah diperkenalkan, penahanan tanpa batas waktu yang jelas dan kondisi buruk masih berlanjut dan menyebabkan kematian dua laki-laki Uyghur. Undang-undang imigrasi baru di Jepang memberi

izin untuk melanjutkan penahanan tanpa batas waktu yang jelas terhadap pengungsi dan pencari suaka, sementara amendemen terhadap undang-undang imigrasi Taiwan gagal untuk mencakup perlindungan terhadap pengembalian atau pemindahan pengungsi dan pencari suaka ke negara asal atau negara lain yang membahayakan (refoulement).

Ada kekhawatiran serius tentang nasib ratusan warga Korea Utara yang dipaksa dipulangkan oleh pemerintah Tiongkok meskipun ada peringatan bahwa mereka kemungkinan akan menghadapi hukuman yang berat. Setelah pengumuman pemerintah Pakistan pada bulan Oktober bahwa pengungsi Afghanistan yang tidak terdaftar harus meninggalkan negara tersebut dalam waktu sebulan, lebih dari 490.000 orang dipaksa kembali ke Afghanistan yang mereka tinggalkan karena takut akan dipersekusi oleh Taliban. Malaysia juga melanggar prinsip non-refoulement dengan memulangkan paksa pengungsi Myanmar ke negara asalnya, di mana mereka terancam menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Respons pemerintah terhadap perdagangan manusia di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand masih tidak memadai. Pekerja asing direkrut dengan cara yang menipu dan dipaksa, seringkali dengan ancaman kekerasan, untuk bekerja di dunia penipuan siber dan operasi perjudian ilegal.

Pemerintah harus berhenti menahan pencari suaka hanya karena status imigrasi mereka. Alih-alih, pemerintah wajib memungkinkan pencari suaka untuk mencari perlindungan internasional. Dalam keadaan apapun, tidak boleh ada yang dipaksa untuk kembali ke suatu tempat di mana mereka bisa menghadapi persekusi atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perlindungan terhadap perdagangan manusia harus diperkuat, dan para korban harus diberikan bantuan hukum dan dukungan lainnya termasuk untuk memfasilitasi repatriasi yang aman.

HUKUMAN MATI

Pemerintah Malaysia mencabut hukuman mati wajib untuk semua pelanggaran dan sepenuhnya menghapus hukuman mati untuk tujuh pelanggaran. Namun, hukuman mati terus digunakan secara luas dan melanggar hukum dan standar internasional. Di Tiongkok dan Vietnam, meski terdapat laporan eksekusi, tetapi angka penggunaan hukuman mati tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Di Afghanistan, hukuman mati dilaporkan telah dijatuhkan, termasuk dengan metode yang kejam dan tidak manusiawi seperti hukuman mati dengan lemparan batu yang berbagai badan PBB percayai sebagai perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Di Singapura, seorang perempuan termasuk di antara mereka yang dieksekusi karena tindak pidana narkoba, sementara aktivis anti-hukuman mati dan pengacara mengalami pelecehan.

Pemerintah yang masih mempertahankan hukuman mati harus segera mengambil langkah-langkah untuk menghapus hukuman mati.

HAK-HAK ANAK

Kriminalisasi terhadap anak-anak terus menjadi kekhawatiran di beberapa negara. Di Australia dan Selandia Baru, anak seusia 10 tahun masih dapat ditahan, sementara fasilitas-fasilitas penahanan anak di kedua negara masih membahayakan hak-hak anak. Di Thailand, hampir 300 anak dikriminalisasi hanya karena partisipasi di berbagai unjuk rasa selama beberapa tahun ke belakang, yang sebagian besar berjalan damai. Salah satunya adalah anak berusia 16 tahun yang dijatuhi hukuman penjara percobaan selama satu tahun karena menyindir raja dalam acara peragaan busana pada tahun 2020. Di Korea Utara, laporan tentang penggunaan anak-anak dalam kerja paksa terus berlanjut.

Pemerintah tidak boleh menangkap atau menahan anak-anak karena mengekspresikan hak-hak mereka, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Pemerintah harus menaikkan usia minimum tanggung jawab pidana menjadi 14 tahun atau lebih dan harus memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan anak, termasuk dengan membatasi secara ketat praktik penahanan.

INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

Para pengunjung rasa ditangkap dan kekerasan berlebihan digunakan untuk membubarkan aksi protes damai. Operasi militer di Papua mengakibatkan pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya. Aktivis pro-kemerdekaan dipenjarakan. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan aparat keamanan terhadap tersangka kriminal merupakan hal yang sering terjadi, dan dalam beberapa kasus mengakibatkan kematian. Kelompok bersenjata non-negara di Papua juga bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum. Pemerintah gagal menerapkan dialog yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak proyek pembangunan kontroversial, sehingga berujung pada penggusuran. Indonesia masih sangat bergantung pada batubara untuk menghasilkan energi dan rencana untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap masih belum memadai.

LATAR BELAKANG

Ketegangan di Papua meningkat setelah penyanderaan seorang pilot, seorang warga negara Selandia Baru, pada bulan Februari oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Bandara Paro, berlokasi di dataran tinggi terpencil di Kabupaten Nduga, provinsi Papua Pegunungan. Merespons aksi penyanderaan ini, militer Indonesia menaikkan status operasional di Nduga menjadi "siaga tempur" dan mengerahkan pasukan tambahan ke daerah tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan warga sipil di sana dan di sekitarnya.

KEBEBASAN BERKUMPUL

Pasukan keamanan menangkap pengunjung rasa damai dan menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan aksi protes, yang seringkali mengakibatkan cedera.

Pada tanggal 5 Agustus, polisi menangkap 18 orang yang sedang menginap di Masjid Agung Sumatera Barat di ibu kota provinsi Padang selama aksi protes terhadap rencana pembangunan kilang minyak dan petrokimia di desa Nagari Air Bangis di kabupaten Pasaman Barat. Polisi mengusir pengunjung rasa lainnya dari gedung, beberapa di antaranya sedang beribadah, termasuk perempuan yang diseret keluar dari masjid. Setidaknya lima jurnalis yang melakukan siaran secara langsung atau melaporkan peristiwa tersebut diserang secara fisik dan diancam oleh petugas kepolisian. Semua orang yang ditangkap, termasuk tokoh masyarakat dan aktivis, mahasiswa dan pengacara, kemudian dibebaskan tanpa tuduhan. Peristiwa ini menyusul adanya aksi protes selama enam hari di Nagari Air Bangis yang dilakukan oleh warga yang khawatir akan risiko pembangunan kilang terhadap kehidupan mereka dan lingkungan setempat.

Pada tanggal 14 Agustus, aparat keamanan menangkap tujuh orang dan menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjung rasa yang memblokir jalan di kota Bandung, Jawa Barat, untuk memprotes rencana penggusuran sekitar 300 warga yang bermukim di Dago Elos, sebuah perkampungan di Kota Bandung. Mereka yang ditangkap termasuk penduduk yang bermukim di Dago Elos dan seorang pengacara yang mendukung mereka dalam sengketa tanah. Semuanya dibebaskan pada 16 Agustus tetapi tiga orang didakwa melakukan tindakan kekerasan. Beberapa orang dilaporkan terluka akibat penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan polisi.²²

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Pihak berwenang terus mengadili orang-orang atas kejahatan terhadap keamanan negara, saat mereka menggunakan hak atas kebebasan berekspresi, termasuk mereka yang menyerukan kemerdekaan Papua.

Setidaknya tiga aktivis Papua dipenjara sepanjang tahun ini karena menyampaikan pendapat mereka.

Pada tanggal 8 Agustus, Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan Yoseph Ernesto Matuan, Devio Tekege dan Ambrosius Fransiskus Elopere bersalah melakukan pidana makar berdasarkan Pasal 55 dan 106 KUHP dan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara untuk ketiganya. Ketiga mahasiswa tersebut ditangkap pada November 2022 saat mengikuti aksi vigili di Universitas Teknologi dan Sains Jayapura dalam rangka memperingati 21 tahun penculikan dan pembunuhan pemimpin pro-kemerdekaan Theys Eluay, yang menampilkan bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua, yang dikibarkan. Ketiganya dibebaskan pada bulan September setelah menjalani hukumannya.²³

PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM

Setidaknya terdapat 26 kejadian yang diduga mengakibatkan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan terjadi di Papua, yang melibatkan total 58 korban.

Pada bulan September, aparat keamanan menembak dan membunuh lima orang asli Papua di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, provinsi Papua Pegunungan. Aparat keamanan menyatakan bahwa kelima orang tersebut, yang berusia antara 15 dan 18 tahun, tewas dalam baku tembak dengan TPNPB-OPM. Sumber lain menyangkal bahwa para pemuda tersebut adalah anggota kelompok bersenjata, namun mereka kembali ke desanya setelah membeli makanan di Dekai. Siapa pun yang meninggalkan Dekai wajib melapor ke pos keamanan yang terletak di perbatasan kota dan jika tidak melakukannya, maka otomatis dianggap menjadi anggota TPNPB-OPM. Pihak berwenang belum memulai penyelidikan atas dugaan pembunuhan tersebut hingga akhir tahun.

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA

Aparat keamanan melakukan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap tahanan untuk mendapatkan informasi atau pengakuan.

Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya masih sering ditemukan di Papua, dimana insiden penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang juga terjadi dalam konteks operasi militer dan di sekitar Kabupaten Nduga. Pada tanggal 6 April, aparat militer menahan dan menyiksa enam orang asli Papua dari desa Kwiyawagi di Kabupaten Lanny Jaya, provinsi Papua Pegunungan. Keenam orang tersebut, termasuk empat anak laki-laki, diangkut dengan helikopter ke markas militer di Timika, di mana Wity Unue yang berusia 17 tahun dilaporkan meninggal akibat luka-luka yang dideritanya akibat penyiksaan. Lima orang lainnya dibebaskan tanpa tuduhan pada tanggal 20 April, tetapi dilaporkan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Belum ada seorang pun yang diadili hingga akhir tahun untuk kejadian tersebut.

Pada bulan September, delapan anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka dalam penyiksaan hingga tewas terhadap seorang tersangka pengedar narkoba saat diinterogasi pada bulan Juli. Tidak ada satu pun dari delapan orang tersebut yang didakwa hingga akhir tahun.

Pada bulan Agustus, jenazah Imam Masykur ditemukan tiga minggu setelah ia diculik dan disiksa oleh tiga tentara dari Pasukan Keamanan Presiden dan militer Indonesia. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Asia, ketiganya menahan pria berusia 25 tahun tersebut di ibu kota Jakarta, setelah

menuduhnya menjual obat-obatan terlarang dan meminta uang tebusan untuk pembebasannya. Jenazah Imam Masykur ditemukan di waduk di Jawa Barat. Pada bulan Desember, ketiga pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diberhentikan dari dinas militer.

PELANGGARAN OLEH KELOMPOK BERSENJATA

Terdapat 11 insiden yang mengakibatkan pembunuhan di luar hukum terhadap 24 korban oleh TPNPB-OPM di Papua yang didokumentasikan sepanjang tahun.

Pada tanggal 28 Agustus, juru bicara kelompok bersenjata tersebut mengklaim bahwa mereka telah membunuh Michelle Kurisi di Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, provinsi Papua Pegunungan. Pada saat kematiannya, Michelle Kurisi Doga sedang melakukan perjalanan untuk mengumpulkan data pengungsian akibat operasi militer di Nduga, namun menurut juru bicara mereka mencurigainya sebagai anggota intelijen militer.²⁴

Warga negara Selandia Baru yang disandera TPNPB-OPM pada bulan Februari belum dibebaskan hingga akhir tahun.

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pemerintah gagal melakukan dialog yang bermakna, serta gagal dalam proses uji tuntas hak asasi manusia yang efektif sebelum mengizinkan dimulainya proyek Rempang Eco-City, sebuah proyek pengembangan industri dan pariwisata bernilai miliaran dolar di Pulau Rempang. Proyek ini melibatkan relokasi sekitar 7.500 warga dari 16 desa yang sebagian besar dihuni oleh Masyarakat Adat Tempatan yang akan mengakibatkan hilangnya akses terhadap tanah leluhur mereka. Proyek pembangunan nasional ditentang keras oleh masyarakat Tempatan dan komunitas lokal lainnya. Meskipun konsultasi mengenai proyek tersebut telah diadakan dengan masyarakat yang terkena dampak pada bulan Agustus, kondisi keamanan di beberapa pertemuan tersebut dilaporkan sangat ketat, dan para pengamat dan saksi menggambarkan pertemuan tersebut hanya sebagai penyebaran informasi satu arah dari pemerintah dan perusahaan kepada warga.

Serangkaian protes terhadap pembebasan lahan untuk proyek Rempang Eco-City diadakan pada bulan Agustus dan September, yang berpuncak pada bentrokan dengan aparat keamanan pada tanggal 7 September di mana beberapa pengunjung rasa melemparkan batu dan botol air dan aparat keamanan membalasnya dengan meriam air, gas air mata, dan peluru karet. Setidaknya 20 pengunjung rasa terluka dan sekitar 25 siswa dari dua sekolah yang terletak di dekat lokasi protes memerlukan perawatan rumah sakit akibat efek gas air mata. Menyusul peristiwa 7 September, pos keamanan gabungan polisi/militer baru didirikan di pulau tersebut. Menurut LSM Lembaga Bantuan Hukum cabang setempat, setidaknya 35 orang didakwa menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya, dengan ancaman hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan. Proses peradilan masih berlangsung hingga akhir tahun.²⁵

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT

Meskipun Indonesia menghasilkan listrik dari energi terbarukan dalam jumlah yang semakin meningkat, negara ini masih sangat bergantung pada batubara untuk pembangkit listrik. Batubara juga merupakan produk ekspor terbesar Indonesia. Rencana untuk menghapuskan penggunaan bahan bakar fosil dalam produksi energi, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, masih belum memadai karena, antara lain, meskipun peraturan tersebut melarang pengembangan pembangkit listrik tenaga batubara yang baru, peraturan ini mengizinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, pemerintah melanjutkan proyek pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt, yang disetujui pada

tahun 2015, yang melibatkan pembangunan 109 pembangkit listrik yang sebagian besar berbahan bakar batubara di seluruh negeri.

-
- ¹ "Challenges faced by women human rights defenders working in conflict, post-conflict or crisis-affected settings", 5 June
 - ² Global: Social media companies must step up crisis response on Israel-Palestine as online hate and censorship proliferate", 27 October
 - ³ "Ethiopia: Meta's failures contributed to abuses against Tigrayan community during conflict in northern Ethiopia", 31 October
 - ⁴ "Israel/OPT: US veto of ceasefire resolution displays callous disregard for civilian suffering in face of staggering death toll", 8 December
 - ⁵ "International Justice Day: Harnessing the Rome Statute and strengthening the system of international justice", 17 July
 - ⁶ An Unstoppable Movement: A Global Call to Recognize and Protect Those Who Defend the Right to Abortion, 24 November
 - ⁷ "Colonialism and sexual orientation and gender identity: Submission to the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity", 15 June
 - ⁸ "Global: Vote in favour of international cooperation on tax helps advance human rights", 22 November
 - ⁹ "Global: COP28 agreement to move away from fossil fuels sets precedent but falls short of safeguarding human rights", 31 December
 - ¹⁰ "Global: Initial pledges at COP28 to finance the Loss & Damage Fund fall far short of what is needed", 30 November
 - ¹¹ "Global: UN backs Pacific Island states by asking the International Court to advance climate justice", 29 March
 - ¹² Anti-Corruption Fight in Peril: Crackdown on Anti-Corruption Human Rights Defenders in West and Central Africa, 11 July
 - ¹³ 'My Eye Exploded': The Global Abuse of Kinetic Impact Projectiles, 14 March
 - ¹⁴ The Repression Trade, 11 October
 - ¹⁵ Rising Prices, Growing Protests: The Case for Universal Social Protection, 10 May; Actions Speak Louder than Words: The World Bank Must Promote Universal Social Protection, 10 October
 - ¹⁶ "Global: Companies must act now to ensure responsible development of artificial intelligence", 14 June
 - ¹⁷ Digitally Divided: Technology, Inequality, and Human Rights, 2 October
 - ¹⁸ Silicon Shadows: Venture Capital, Human Rights, and the Lack of Due Diligence, 13 December
 - ¹⁹ The Predator Files: Caught in the Net, 9 October
 - ²⁰ 'I feel exposed': Caught in TikTok's surveillance web, 7 November; Driven into Darkness: How TikTok's 'For You' Feed Encourages Self-Harm and Suicidal Ideation, 7 November
 - ²¹ "Hateful and abusive speech towards LGBTQ+ community surging on Twitter surging under Elon Musk", 9 February
 - ²² "Indonesia: The Indonesian people have not yet gained freedom from state violence", 16 August (Indonesian only)
 - ²³ "Indonesia: Release three Papuan students from treason charge", 8 August (Indonesian only)
 - ²⁴ "Indonesia: Investigate the perpetrators of the murder of Michelle Kurisi and armed violence against civilians in Papua", 30 August (Indonesian only)
 - ²⁵ "Indonesia: Do not force Batam residents to accept national strategic project", 8 September (Indonesian only)

KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA

APRIL 2024

Setiap tahun, Amnesty International mendokumentasikan kondisi hak asasi manusia di dunia. Penelitian kami mengungkapkan bahwa, di seluruh dunia, pihak berwenang terus menyerang kebebasan universal. Negara-negara dan kelompok-kelompok bersenjata melanggar dan membengkokkan aturan-aturan perang dan rasisme merupakan inti dari beberapa konflik bersenjata dan respon terhadapnya. Krisis ekonomi, perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap komunitas yang termarginalkan. Pembela hak asasi manusia yang mengkampanyekan hak-hak komunitas ini menjadi sasaran penindasan yang lebih luas terhadap perbedaan pendapat. Reaksi terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan serta kelompok ragam gender dan seksualitas semakin meningkat. Hasutan dan konten berbahaya lainnya yang diposting daring terhadap beberapa kelompok ras tertentu meningkat. Sementara kemajuan kecerdasan buatan digunakan untuk membatasi kebebasan dan melanggar hak asasi manusia.

Laporan ini mendokumentasikan permasalahan hak asasi manusia selama tahun 2023 di 155 negara, menghubungkan isu-isu di tingkat global dan regional dan melihat implikasinya di masa depan. Laporan ini menyerukan tindakan dan menunjukkan langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak lain untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Laporan ini menjadi bacaan penting bagi para pemimpin pemerintah, pembuat kebijakan, advokat, aktivis, dan siapa pun yang tertarik pada hak asasi manusia.

AMNESTY
INTERNATIONAL

